

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R
((REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE))**

(Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung
Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Nama

Devi Hernawati

NIM. 0910311004



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2013

MOTTO

"Allah dulu, Allah lagi, Allah seterusnya."

*Menyertakan Allah disetiap kegiatan insyallah
mendapatkan ridho dariNya. Berdoa, bersabar
dan terus berusaha"*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
(*Reduce, Reuse, Dan Recycle*) (Studi pada Tempat Pembuangan Sampah
Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

Disusun oleh : Devi Hernawati

Nim : 0910311004

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 04 Februari 2013

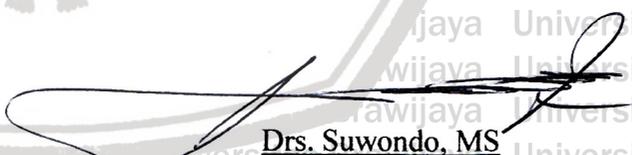
Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Choirul Saleh, M.si

NIP. 19600112 198701 1 001


Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis pengujian skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

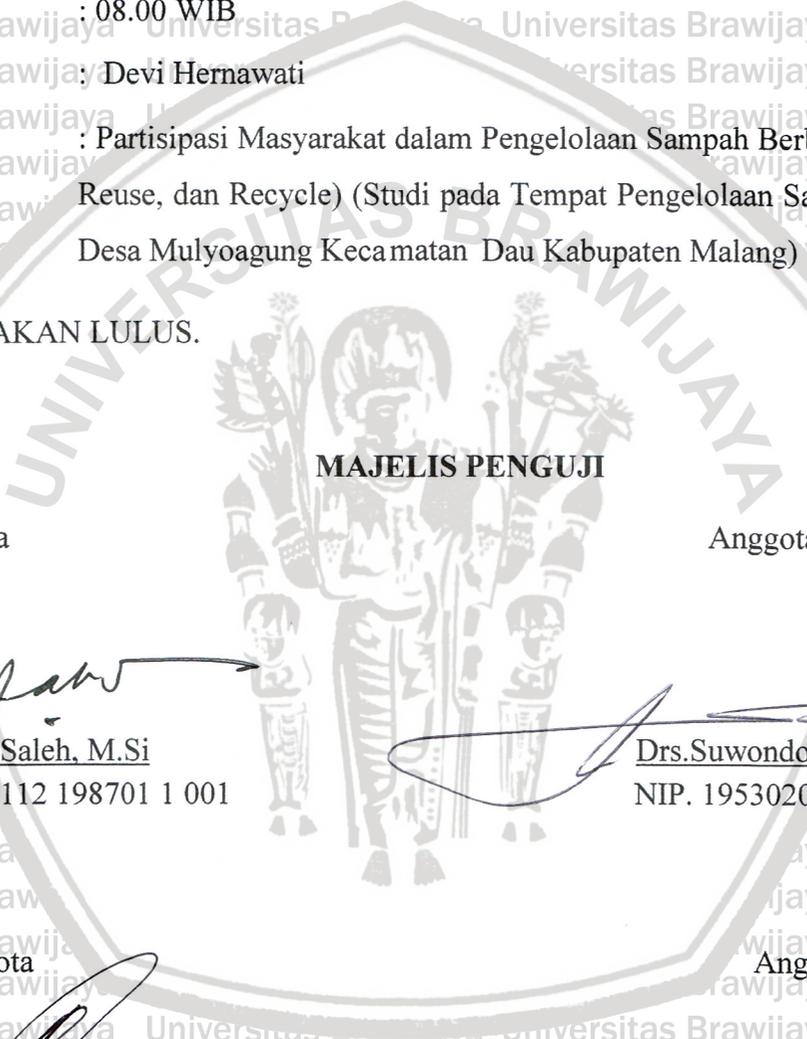
Tanggal : 04 April 2013

Jam : 08.00 WIB

Nama : Devi Hernawati

Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS.



MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota


Dr. Choirul Saleh, M.Si
NIP. 19600112 198701 1 001


Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002


Drs. Romula Adiono, M.AP
NIP. 19620401 198703 1 003

RINGKASAN

Devi Hernawati, 2013, **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Dan Recycle*)** (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Dr. Choirul Saleh, M.si, Drs. Suwondo, Ms. 119 + xvi

Pada dasarnya pembangunan dan lingkungan hidup terjalin hubungan saling mempengaruhi. Pembangunan tergantung pada lingkungan dan lingkungan tergantung pada pembangunan. Pembangunan dan pengelolaan lingkungan membutuhkan partisipasi masyarakat agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Mulyoagung serta untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah setelah TPST dibangun.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian, yakni Kepala Desa Mulyoagung, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Masyarakat Desa Mulyoagung. Fokus pada penelitian ini adalah mengenai (1) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan TPST, partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan TPST (2) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R meliputi, pra pengelolaan, proses pengelolaan, dan pasca pengelolaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan fokus penelitian yang peneliti ambil dengan pemaknaan dari beberapa informan yang peneliti lakukan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa nya yaitu pembangunan TPST, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan memelihara hasil pembangunan sudah baik. Selain itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sudah baik. Terlihat dari tahap pewadahan sampah sampai proses pengomposan.

Saran dari peneliti adalah pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyediakan dua tempat sampah yang berbeda antara sampah basah dan sampah kering, karena di Desa Mulyoagung tempat sampah antara sampah basah dan sampah kering menjadi satu tempat.

SUMMARY

Devi Hernawati, 2013. Public Participation in Waste Management Based on 3R (Reduce, Reuse, and Recycle) (The Study in The Integrated Waste Management at Mulyoagung Village, Dau District, Malang). Dr. Choirul Saleh, M.si, Drs. Suwondo, Ms.119 + xvi

Basically, there is an influential relationship between development and environment, they depend on one another. Environmental development and management require the people's participation to the working of a policy. This study aims to figure out how the society's participation in the development of Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) at Mulyoagung village and to find out how their participation in waste management after TPST built.

This is a descriptive study with qualitative approach. The research data collection techniques used interview method addressed to the sources (informants) that are determined by research requirement. They were the Head of Mulyoagung Village, leader of Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) and the society of Mulyoagung Village. The focus of this research is on how (1) people's participation in TPST development planning, the participation in implementing TPST development, the participation in the maintenance and utilization TPST development (2) the participation in waste management 3R-based including pre-management, management process, and post-management.

Based on the focus of the study the researcher took by interpreting some informants that researcher do, the results showed that the people's participation in development of TPST in their village including planning, implementing and maintaining the development results is excellent. In addition, their participation in waste management is good. It can be seen from the trash accommodation stage until composting process.

Researcher suggestion is that the government should always involve people in a village development so that the goal can be reached exactly and appropriate with the people's need. The government provide two different trash can including wet trash and dry trash, because in mulyoagung village those two things are not separated.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, Taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*). Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku dosen Ketua Pembimbing dan Bapak Drs. Suwondo, MS selaku dosen Anggota Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan keluarga besar yang telah banyak berdoa dan memberikan spirit, motivasi dan dorongan kepada penulis agar selalu berada pada jalan yang terbaik dalam lindungan Allah SWT.
5. Semua perangkat Desa Mulyoagung dan Kepala Desa Mulyoagung Bapak Sumardi serta semua pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Mulyoagung Bapak Supadi selaku ketua KSM.
6. Masyarakat Desa Mulyoagung yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang meluangkan memberikan waktunya membantu peneliti dalam memberikan informasi.
7. Teman-teman FIA Publik angkatan 2009, khususnya sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan bantuan kalian semua yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

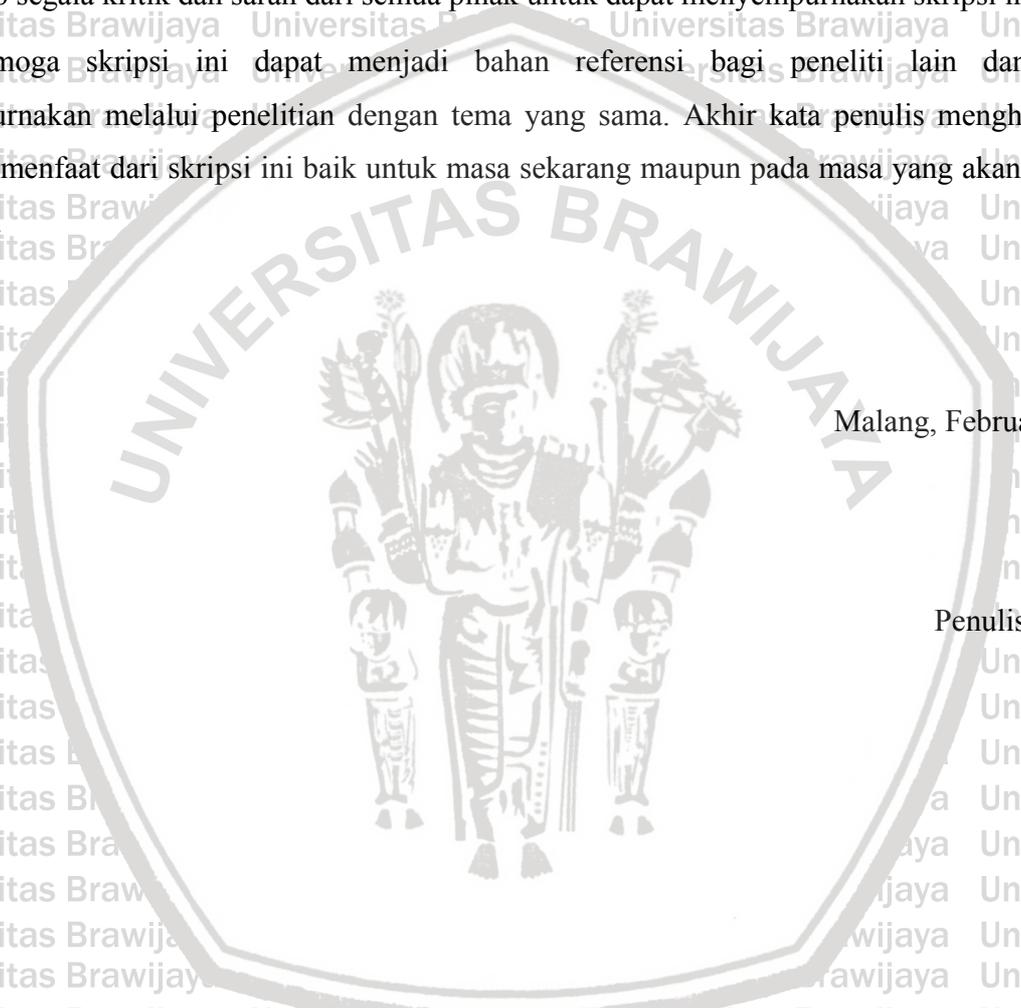
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik kepada Anda semua.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Aamin.

Malang, Februari 2013

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Teori Pembangunan	12
1. Pengertian Pembangunan	12
2. Paradigma Pembangunan	14
a. Teori Pemberdayaan Masyarakat	15
b. Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan	17
c. Pengertian Persepsi	18
B. Administrasi Pembangunan	19
C. Pembangunan Desa	22
D. Pengertian Desa	24
E. Partisipasi	25
1. Pengertian Partisipasi	25
a. Bentuk-Bentuk Partisipasi	27

b. Jenis-Jenis Partisipasi.....	28
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	29
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	31
a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.....	31
b. Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan.....	34
c. Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara dan Memanfaatkan Pembangunan.....	37
F. Sampah.....	37
1. Pengertian sampah.....	37
2. Pengelolaan Sampah.....	39
3. Jenis-Jenis Sampah.....	41
G. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan sampah berbasis 3R (<i>reduce, reuse, dan recycle</i>).....	44

BAB III. METODE PENELITIAN

	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Metode Analisis Data.....	54

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang.....	59
a. Keadaan Geografis Kabupaten Malang.....	59
b. Keadaan Demografi Kabupaten Malang.....	60
2. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang.....	61
3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	64
a. Kecamatan Dau.....	64
b. Desa Mulyoagung.....	68
c. Kelompok Swadaya Masyarakat Mulyoagung Bersatu.....	72
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	75
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST).....	75
a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan TPST.....	75
b. Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan TPST.....	78
c. Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara dan Memanfaatkan TPST.....	82
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R.....	90

a. Pra Pengelolaan	90
b. Proses Pengelolaan	93
c. Paska Pengelolaan	102
C. Pembahasan	105
1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)	105
a. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan TPST	105
b. Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Pembangunan TPST	109
c. Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara dan Memanfaatkan Produk (Hasil Olahan) dari TPST	110
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R	113
a. Pra Pengelolaan	113
b. Proses Pengelolaan	114
c. Paska Pengelolaan	115

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

120

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1	Pengelompokan Sampah	43
2	Jumlah Penduduk Kecamatan Dau Periode Desember 2011	66
3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	67
4	Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung Berdasarkan Umur	68
5	Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung Berdasarkan Gender	69
6	Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan	69
7	Jumlah Wakil Masyarakat yang Hadir Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan TPST Desa Mulyoagung Tahun 2009	78
8	Daftar Penetapan Iuran TPST Mulyoagung Bersatu	83
9	Data Iuran Warga TPST Mulyoagung Bersatu/bulan	85
10	Jumlah Pegawai TPST Mulyoagung Bersatu	89

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
1	Proses dan Analisis Data Menurut Spradley	56
2	Peta Kabupaten Malang	61
3	Struktur Organisasi Desa Mulyoagung	71
4	Struktur KSM Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	74
5	Alur Pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu	77
6	Pewadahan Sampah tanpa Pemilahan	91
7	Pemilahan Sampah	93
8	Pengangkutan Sampah	94
9	Pelaksanaan Konsep 3R	96
10	Penggunaan Langsung (Reuse)	97
11	Proses Pengomposan	101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Surat Riset	123
2	Surat Persetujuan Survei	124
3	Foto Dokumentasi	125
4	Daftar Pertanyaan	127
5	Daftar Riwayat Hidup	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya pencapaian kesejahteraan masyarakat dilalui dengan jalan perubahan-perubahan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, perubahan tersebut dilakukan melalui pembangunan, tujuan pembangunan masyarakat ialah perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, sehingga kemiskinan dan lingkungan hidup masyarakat mengalami perubahan. Pembangunan menurut Siagian (1983:3) adalah “pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Dengan artian bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.

Dimana dominasi negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan

demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat

sebagai objek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu ikut masyarakat dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 pasal 1 di poin 1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diperlukan.

Pada dasarnya pembangunan dan lingkungan hidup terjalin hubungan saling mempengaruhi. Pembangunan tergantung pada lingkungan dan lingkungan tergantung pada pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Soemarwoto

(1989:146) bahwa “pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

lingkungan hidup. Interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem”. Kompleksitas kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya, telah mengakibatkan bermacam-macam permasalahan sosial dan bencana alam seperti *global warming*, banjir, tanah longsor yang dikarenakan kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan merupakan salah satu hal yang menarik untuk dibahas karena kondisi lingkungan di Indonesia sebenarnya sangat memprihatinkan. Seperti yang disunting Asrul (2012) dalam www.kompasiana.com menuliskan bahwa :

“....Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Balthasar Kambuaya, bahwa fenomena pengelolaan persampahan di Indonesia sampai saat ini semakin memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten dan Kota sepertinya setengah hati dalam mengelola sampahnya di daerah, hampir semua pengelolaan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terjadi stagnan.....”.

Di Desa Mulyoagung yang terletak di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, pada tahun 2010 telah berhasil membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang digagas oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdasarkan data TPST Mulyoagung, dana pembangunan TPST ini diperoleh dari beberapa lembaga, antara lain :

1. Program Nasional Pemberayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar ± 100 Juta
2. APBN sebesar 1,2 Miliar Rupiah

3. APBD Kabupaten Malang sebesar 100 Juta Rupiah

4. Desa Mulyoagung yang berupa lahan seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$

5. Serta partisipasi dari masyarakat Desa Mulyoagung

Dengan adanya pembangunan TPST diharapkan bisa memberikan nilai ekonomis dan nilai tambah bagi masyarakat, karena saat ini sampah bisa menghasilkan profit jika dikelola dengan baik. Dan sekarang TPST Mulyoagung berhasil hingga saat ini menjadi percontohan nasional untuk pengolahan sampah (<http://lpm.uin-malang.ac.id/>).

Desa Mulyoagung yang memiliki luas wilayah 296594 Ha dan dengan tingkat populasi penduduk mencapai 3970 Kepala Keluarga merupakan salah satu desa tujuan perpindahan penduduk dari kota maupun luar daerah atau provinsi. Oleh karena itu, keberadaan penduduk bersifat heterogen yang berpengaruh sekali pada tata cara kehidupan penduduk yang semula bersifat pedesaan menjadi perkotaan.

Akibatnya lambat laun dapat menggeser tata cara pedesaan yang selama ini digunakan. Meningkatnya jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Selain itu, meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.

Berdasarkan data TPST Mulyoagung Bersatu tahun 2011, di Desa Mulyoagung volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh tiap rumah warga tidak kurang dari 7.940 kg dan hal ini masih belum termasuk sampah dari rumah produksi di wilayah Desa Mulyoagung. Dapat diperkirakan bahwa total keseluruhan volume sampah yang dihasilkan oleh Desa Mulyoagung setiap harinya rata-rata mencapai 8 sampai dengan 9 ton sampah. Dengan banyaknya volume sampah tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Bahar (1986:7) bahwa sampah yang tidak dikelola secara baik, keberadaannya sering menimbulkan masalah bagi lingkungan, seperti :

1. Sampah yang tidak teratasi dengan baik dapat menyebabkan lingkungan tidak baik secara estetika.
2. Sampah yang membusuk menghasilkan gas yang berbau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan, air yang dikeluarkan juga dapat menyebabkan pencemaran sungai, maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyebabkan tersumbatnya saluran drainase sehingga dapat menimbulkan banjir.
4. Kawasan yang padat penduduknya seperti kota besar akan kesulitan mencari lahan baru untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Secara *de jure* Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu sampai hilir. Lebih lanjut lagi penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun

2010 tentang Pengelolaan Sampah meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R. Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan kembali) dan *Recycle* (Mendaur ulang) sampah mulai dari sumbernya.

Untuk menindaklanjuti kebijakan nasional pembangunan bidang persampahan dengan sasaran peningkatan akses pelayanan yang mengarah pada target MDG's, seperti pengurangan volume sampah melalui program 3R, diperlukan kesadaran dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Menteri Pekerjaan Umum RI, 2006). Masalah sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Sudah saatnya masyarakat sebagai penghasil sampah ikut membantu, bahkan ikut bertanggungjawab minimal mengurus sampahnya sendiri. Mengingat keberhasilan program 3R sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagai penghasil sampah, maka perlu dikembangkan pengelolaan sampah dengan konsep berbasis masyarakat.

Dengan latar belakang itulah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui bagaimana dan sejauhmana partisipasi masyarakat terhadap pembangunan TPST dan pengelolaan sampah rumah tangga pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung yang telah berhasil dan masih

berjalan hingga saat ini. Dengan pertimbangan asumsi tersebut, maka peneliti mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Dan Recycle*)”** (Studi pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang).

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Sedangkan masalah itu sendiri dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat peneliti susun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)?
2. Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, dan recycle*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam Pembangunan

tempat pengelolaan sampah terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).

D. Kontribusi Penelitian

Secara tertulis penelitian diharapkan bermanfaat secara praktis bagi:

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pendapat dan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Malang khususnya pemerintahan desa di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembangunan desa.
2. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa khususnya Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang mengenai pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan desa.
3. Sebagai bekal dan tambahan pengetahuan bagi penulis dalam memahami, menelaah, dan mengetahui pemecahan masalah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

E. Sistematika Pembahasan

Materi yang disajikan dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 5 bab, dimana setiap bab akan memuat pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TIJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi yaitu: Administrasi Pembangunan, Pembangunan, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R.

BAB III : METODE PENELITIAN

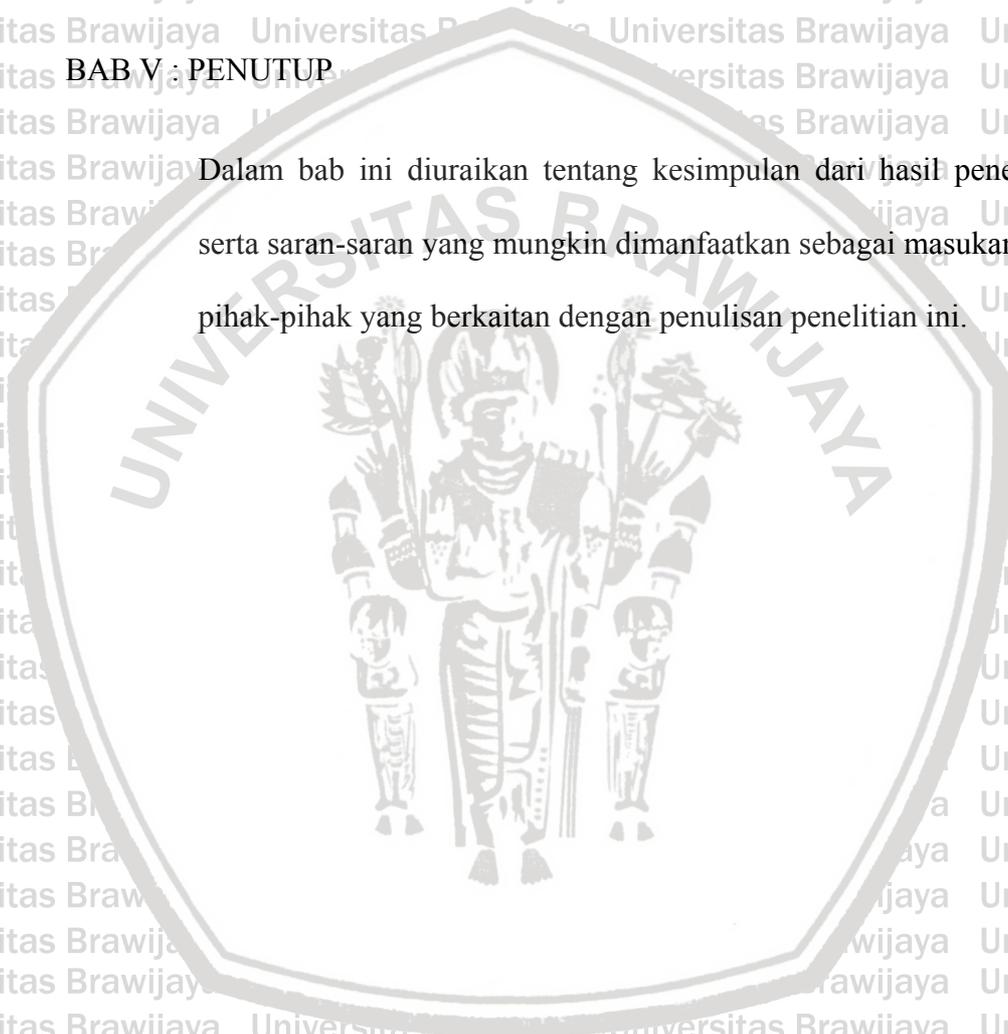
Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data mengenai gambaran umum lokasi dan situs penelitian, penyajian data, serta analisa dan interpretasi data yang didapat selama penelitian

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang mungkin dimanfaatkan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Hakekat dari pembangunan adalah pendayagunaan potensi masyarakat semaksimal mungkin dengan jalan partisipasi aktif menurut tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Selain itu pembangunan merupakan suatu upaya masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat bangsa itu. Menurut Tjokroamidjodjo (1980:59) dikemukakan pula pengertian pembangunan yaitu “Pembangunan adalah suatu proses dinamis, pembangunan adalah usaha kearah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan untuk mewujudkan ide-ide dan realita yang akan terus berlangsung sepanjang kurun sejarahnya”.

Hal senada disampaikan oleh Ndraha (1982:53) pembangunan adalah segala macam bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang dikendalikan. Perubahan sosial yang dikendalikan itu diharapkan tidak hanya mencapai tingkat kelompok melainkan juga tingkat anggota masyarakat. Proses dalam mana tiap anggota masyarakat mengalami perubahan yang mendasar dari cara hidup tradisional ke tingkat hidup yang teknologi dan mental lebih maju, ini disebut modernisasi.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan berarti upaya yang terus menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia dalam posisi dan peranannya secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras dan dinamis, sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan.

Sedangkan Suryono (2004:22), menyebutkan adanya 8 (delapan) tipe pembangunan, yakni:

1. Tipe ideal (*ideal type*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan dan perubahan sistem.
2. Tipe menghasilkan dalam jangka pendek (*short run pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan pertumbuhan, tetapi tidak dalam perubahan sistem.
3. Tipe menghasilkan dalam jangka panjang (*long ran pay of*) dengan ciri perencanaan yang mampu mengendalikan perubahan sistem, tetapi tidak dalam pertumbuhan.
4. Tipe kegagalan (*failure*) dengan ciri adanya perencanaan tetapi tidak mampu mengendalikan baik pertumbuhan maupun perubahan sistem.
5. Tipe dorongan lingkungan (*environmental stimulus*) dengan ciri mengutamakan perubahan sistem dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan pertumbuhan.

6. Tipe pragmatis (*pragmatisme*) dengan ciri mengutamakan adanya pertumbuhan dan perubahan sistem, tetapi mengabaikan pentingnya perencanaan.

7. Tipe krisis (*crisis*) dengan ciri lebih mengutamakan tingkat pertumbuhan dan mengabaikan pentingnya perencanaan dan perubahan sistem.

8. Tipe masyarakat (*static society*) dengan ciri mengabaikan pentingnya semua aspek perencanaan, pertumbuhan, maupun perubahan sistem.

Selain itu model pembangunan menurut Suryono (2004:25) bahwasannya yang dibutuhkan di dalam sebuah pembangunan tidak lain menekankan pada suatu rangkaian model nasional yang dibuat oleh bangsa yang bersangkutan tersebut yaitu:

- (1) Didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan nasional.
- (2) Bergerak pada kecepatan berapa saja yang layak.
- (3) Diarahkan menuju apa yang dipersepsikan oleh negara dan masyarakat tersebut sebagai tujuannya.

2. Paradigma Pembangunan

Menurut Suryono (2010:114), “paradigma dimaksudkan sebagai cara pandang terhadap sesuatu persoalan yang di dalamnya terdapat sejumlah asumsi tertentu, teori tertentu, model tertentu dan solusi tertentu”. Berikut ini

beberapa teori dalam pembangunan yang digunakan dalam menganalisa permasalahan.

a) Teori Pemberdayaan masyarakat

Konsep Pemberdayaan Masyarakat (*empowerment*) mulai tampak kepermukaan sekitar dekade tahun 19970-an, dan terus berkembang sampai dengan tahun 1990-an (atau akhir abad ke 20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Konsep pemberdayaan dipandang sebagai bagian dari aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *postmodernism*.

Menurut Gunawan (2007:25) :

“Pemberdayaan sebagai konsep alternatif pembangunan, dengan demikian menekankan otonomi pengambilan keputusan suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Fokusnya adalah lokalitas, karena *civil society* lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal”.

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata-masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang disuatu negara. Menurut Friedman dalam Suryono (2010:260) :

“Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan *resultante* dari kegagalan arus utama model pembangunan ekonomi yang berupa ketidakmampuan memecahkan masalah kemiskinan dan keberlangsungan lingkungan, sehingga membutuhkan sebuah alternatif pembangunan yang lain. Alternatif pembangunan tersebut harus dipusatkan pada manusia dan lingkungan daripada produksi, laba dan pendekatan pertumbuhan ekonomi yang menggunakan

asumsi-asumsi perusahaan sebagai dasar ekonomi neoklasik. Oleh karena itu, model alternatif pembangunan yang mampu memberdayakan manusia tersebut harus didasarkan pada lingkungan kehidupan sosial dari sudut pandang mikro yaitu aspek kerumah-tanggaan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari kekuatan masyarakat itu sendiri. Konsep *power* dalam masyarakat merupakan variabel jumlah. Kekuatan masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai apabila ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negatif terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan”.

Untuk memberdayakan masyarakat, perlu beberapa hal yang perlu ditawarkan agar masyarakat mengerti dan memahami apa yang harus dilakukan sebagai subjek dalam turut serta melakukan pembangunan. Ada beberapa strategi yang ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat menurut Suryono (2010:262) :

“Ada empat strategi yang dapat ditawarkan dalam memberdayakan masyarakat, antara lain: (1) memberdayakan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subyek, (2) mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan / pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif, demokratis, efektif dan efisien, (3) mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya, dan (4) memaksimalkan peran pemerintah (khususnya pemerintah kelurahan dan desa) dalam memfasilitasi dan mengatur pelaksanaannya guna kelancaran penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”.

Namun pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata dari pemerintah lalu turun ke masyarakat melainkan adanya interaksi dari kedua belah pihak tersebut. Seperti konsep pemberdayaan menurut Walter Stohr and

Fraser Taylor dalam Gunawan (2007:29), “merupakan hasil interaksi di tingkat idiologis maupun praktis. Di tingkat idiologis, konsep ini merupakan hasil interaksi antara konsep *top down* dan *bottom up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*”.

Sedangkan model pemberdayaan masyarakat yang berpusat rakyat atau model *people centre development*. Menurut model ini pembangunan kualitas manusia adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia untuk mempengaruhi dan mengatur masa depannya. Model pembangunan ini disebut Korten dalam Suryono (2010:2264) ;

“Sebagai *people centre development*. Model ini mencoba mengangkat martabat manusia sebagaimana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki kemampuan intelegensi dan sekaligus memiliki perasaan. Manusia tidak dapat disamakan dengan alat produksi untuk melipatgandakan hasil semata, meliankan manusia hendaknya dihargai dan dihormati, dengan cara meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga akan menempatkan manusia pada martabat yang lebih baik dan layak. Contoh-contoh program yang menerapkan model ini antara lain program Inpres Desa Tertinggal (IDT)”.

b) Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, memberikan keyakinan bagi masyarakat Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai, bila didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam. Oleh sebab itu dalam proses pembangunan, faktor lingkungan perlu diutamakan untuk menjamin kesejahteraan dimasa akan datang. Menurut Sugandhy (2007:4) :

“Pembangunan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi mendatang”

UUD Tahun 1945 pasal 33 juga menyebutkan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat tersebut secara berkelanjutan harus bisa dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

c) Pengertian Persepsi

Secara umum, persepsi adalah proses internal kita memilih mengevaluasi dan mengorganisasikan stimuli dan lingkungan kita.

Definisi persepsi lainnya menurut Rakhmat Jalaludin (1998:51), adalah “pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”.

Syarat terjadi persepsi atau persepsi sebagai pengorganisasian pengamatan seseorang tentang suatu obyek di sekitarnya.

1. syarat Fisis

segala sesuatu yang ada dari sekitar individu yang merangsang alat inderanya, yang bisa berupa : manusia, benda atau peristiwa, demikian pula segala yang dapat didengar, dicium, diraba dan dirasakan termasuk fisis.

2. Syarat Fisiologis

Kelengkapan organ tubuh yang dimiliki individu merespon segala rangsangan yang datang : alat indera, alat saraf sensori dan otak

terjadi kesadaran sebagai hasil dari penginderaan tentang stimulus yang datang, kemudian diterima dan diteruskan oleh saraf sensoris ke susunan otak sampai terjadi suatu kesadaran. Setiap alat indera mempunyai sifat dan tingkat kepekaan masing-masing dalam merespon suatu perangsang.

3. Syarat Psikologis

Syarat psikologis menurut Rakhmat (2002:52) “termasuk kebutuhan, kesiapan dan perhatian. Ketiga faktor ini memiliki hubungan yang erat yaitu kadar intensitas persepsi mengindikasikan intensitas kebutuhan dan kesiapan demikian pula sebaliknya”.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan merupakan salah satu bagian dari administrasi negara. Administrasi pembangunan ini mempunyai fokus analisis berupa proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu negara dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman (Siagian, 2005:23). Selanjutnya, siagian menyebutkan definisi dari administrasi pembangunan yaitu sebagai suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (mation-building). Selain itu, Tjokroamidjojo dalam Siagian (2005:24)

menyebutkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Dari definisi tersebut dapat diketahui ide pokok dari administrasi pembangunan, yaitu: (1) adanya suatu proses yang terus menerus, (2) usaha yang dilakukan dengan perencanaan, (3) orientasi pada perubahan yang signifikan dari keadaan sebelumnya, (4) memiliki arah yang lebih modern dalam artian yang luas mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan (5) memiliki tujuan utama untuk membina bangsa.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut Tjokroamidjojo (1974:9-10), administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lebih memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara yang baru berkembang.
2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaannya yang efektif. Bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan kebijaksanaannya melalui proses politik.

3. Justru berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik untuk suatu masyarakat di masa depan.

Lebih berorientasi pada masa depan.

4. Lebih berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan (*development functions*) dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan yang efektif yang telah disepakati bersama. Administrasi pembangunan lebih bersifat *development agent*.

5. Administrasi pembangunan harus mengkaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan diberbagai bidang yaitu ekonomi, social, budaya dan lain-lain. Dengan kata lain administrasi dari kebijaksanaan dan isi-isi program pembangunan.

6. Dalam administrasi pembangunan administrator dalam aparat pemerintah juga bisa merupakan badan penggerak perubahan (*change agents*).

7. Lebih berpendekatan pada lingkungan (*ecological approach*) berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus oleh aparat pemerintah demi tercapainya tujuan dengan memberikan perhatian kepada masyarakat dan lingkungan di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, social, budaya, dan lain sebagainya.

C. Pembangunan Desa

Menurut Ali (2007:7) yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah, “Pembangunan desa adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan secara sistematis dan bertahap di semua bidang yang menjadi tanggungjawab dan menuntut partisipasi dari semua warga dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata”.

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan ujung tombak keberhasilan pemabngunan nasional. Berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa akan berdampak pada suksesnya pembangunan nasional nantinya. Menurut Bintarto (1980:25) yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah “pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu desa atau kelurahan. Ciri utama pembangunan desa atau kelurahan baik melaksanakan secara langsung dalam bentuk swadaya gotong-royong”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa di dalam pembanungan desa terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia
2. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam lingkup pedesaan
3. Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa baik lahir maupun batin
4. Partisiapsi aktif masyarakat desa dengan memanfaatkan segenap potensi desa yang ada, disamping swadaya dan gotong-royong.

Sedangkan menurut Tjokrowinoto dalam Purnamasari (2008), pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya:

“(1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa”.

Menurut Muhi (2011), Pembangunan Desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu :

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan

dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

2. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marginal agar dapat

melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan pembangunan pada umumnya dan pelaksanaan pembangunan desa pada khususnya, maka dapat dilihat adanya beberapa potensi yang dimiliki dan dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang dicita-citakan. Pengertian potensi desa sebenarnya adalah meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi, baik yang sudah terwujud, maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya.

D. Pengertian Desa

Desa adalah suatu daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan yang mempunyai ikatan kekeluargaan, ikatan sosial yang hidup serta tinggal atau menetap di suatu daerah tertentu adat istiadat yang dijadikan landasan hukum dan mempunyai seorang pimpinan formil yaitu kepala desa (Marbun, 1983:19).

Definisi Desa menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 adalah “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Lebih lanjut lagi, dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI tentang desa pasal 200 ayat (3) mengatakan bahwa Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

Melalui definisi tersebut, Desa sebagai suatu unit kelembagaan pemerintahan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan. Wilayah pedesaan disini dapat diartikan sebagai wilayah yang produknya mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi wilayah sebagai pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dengan kegiatan ekonomi.

E. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keberansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya

memutuskan tentang rencanarencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Menurut Juliantara dalam Purnamasari (2008), substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

“Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, dalam Purnamasari : 2008)”.

Pengertian partisipasi menurut Poetro (1988:39) “partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Sedangkan menurut Alastraire White dalam (Poetro, 1988:52) partisipasi diartikan sebagai “keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan”.

Dengan demikian partisipasi merupakan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara

sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

a. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Sedangkan menurut Effendi dalam Zakaria (2011), partisipasi dibagi atas dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai posisi bawahan.

2. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Menurut Effendi sendiri tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

b. Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut pendapat Keith Davis sebagaimana yang dikutip (Sastropetro, 1988:16) mengemukakan jenis partisipasi sebagai berikut:

1. Pikiran (*psychological participation*), merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengerahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Tenaga (*physical participation*), adalah partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu.
3. Pikiran dan tenaga (*psychological and physical participation*), Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi disamping mengikutsertakan aktifitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan.

4. Keahlian (*participation with skill*), merupakan bentuk partisipasi dari orang atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya.

5. Barang (*material participation*), partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.

6. Uang (*money participation*), partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan tersebut.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Ndraha (1990:22) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai

dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Jenis Kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

3. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

4. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

5. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meliputi berbagai hal sebagaimana dikemukakan oleh Sumoharjo (1984:54) yaitu “Keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha merealisasikan aspirasinya dengan jalan menyumbangkan pikirannya, inisiatif, dan kretivitasnya dalam bentuk pikirannya, usul, saran-saran dalam rapat resmi dan tidak resmi”.

Dalam suatu rencana pembangunan, biasanya fokus perhatian dalam kegiatan perencanaan lebih intern pada penyusunan program kegiatan. Karena dalam program kegiatan itulah akan terlihat hal-hal yang akan dikerjakan, sumber dana, jumlah dana, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Tujuan perencanaan pembangunan yaitu:

1. Suatu perencanaan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economy growth*).
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pola kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembnagunan antar daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembnagunan.
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasarkan kemampuan sendiri atau nasional.
8. Usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi (Tjokroamidjojo dalam Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2006:41).

Lebih lanjut Riyadi dan Bratakusumah dalam Purnamasari (2008), mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, maka perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat melaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan), serta

perlu disusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak terlalu mengatur, penting, mendesak dan mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas, sekaligus mampu mengantisipasi tuntutan perubahan baik internal maupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan. Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan sehingga terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, keduanya menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu konsep perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi berpegang pada asas prioritas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu

proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

b. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan, pengukurannya bertitik pangkal pada bagaimana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan di dalam kegiatan fisik. Dengan demikian pengukurannya adalah bagaimana masyarakat memberikan sumbangan dalam hubungannya dengan kegiatan lembaga yang bersangkutan. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, tenaga dan dapat pula berwujud barang (material).

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dijelaskan oleh Keith Davis (Sastropetro, 1988:16) yaitu:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.
6. Aksi massa.
7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Sedangkan menurut Ndraha (1982:82) Dalam Mustari, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, meliputi:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.
2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
4. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan.
5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka penulis membatasi bentuk partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam mengemukakan pendapat dan pikiran
- Partisipasi masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan pikiran dalam hubungannya dengan pembangunan desa diwujudkan dalam keikutsertaan secara aktif masyarakat dalam memberikan sumbangan yang berupa pendapat dan pikiran yang berkaitan dengan pembangunan desa. Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang

besar, maka hendaknya semua masyarakat dilibatkan dalam musyawarah pembahasan tentang pembangunan, sehingga seluruh aspirasi dan kehendak masyarakat dapat ditampung dan dapat dipertimbangkan dalam melaksanakan pembangunan, sehingga nantinya program-program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Partisipasi dalam bentuk tenaga

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan desa, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka.

Partisipasi tenaga kerja yang ada di desa di dasari dengan semangat gotong royong.

3. Partisipasi dalam bentuk *skill* atau keahlian

Partisipasi dalam bentuk *skill* atau keahlian ini diwujudkan dengan memberikan sumbangan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh masyarakat desa hubungannya dengan pembangunan desa.

4. Partisipasi dalam bentuk sumbangan atau materiil

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk materi yang merupakan sumbangan dari semua warga desa.

5. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan

Partisipasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Seluruh warga desa harus dilibatkan keikutsertaannya dalam setiap agenda pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

c. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan sebagaimana yang dikemukakan Syamsi (1986:59) antara lain meliputi :

1. Sikap warga negara terhadap hasil-hasil dari pembangunan.
2. Usaha-usaha dalam memanfaatkan setiap hasil-hasil pembangunan.
3. Setiap warga dalam menilai setiap hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

Sedangkan menurut Slamet (1994:89), partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) yaitu pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

F. Sampah

1. Pengertian Sampah

Dalam Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat. Selanjutnya menurut Kamus Lingkungan dalam Basriyanta (2007: 17), "sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau

tidak berharga untuk digunakan secara biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang rusak atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan”. Sedangkan menurut istilah lingkungan untuk manajemen, Ecolink dalam Basriyanta (2007:17), “sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis”.

Dengan demikian sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan masyarakat yang berwujud padat baik berupa sampah basah (*organik*) maupun sampah kering (*anorganik*) yang bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga dibuang ke lingkungan oleh pemiliknya atau pemakai semula.

Sedangkan menurut Hardiwiyo (1983:12) ciri-ciri sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah adalah bahan sisa, baik bahan yang sudah tidak digunakan lagi (barang bekas) maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya.
- b. Dari sosial ekonomis, sampah adalah bahan yang sudah tidak ada harganya.
- c. Dari segi lingkungan, sampah adalah bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Dari ciri-ciri tersebut dapat diberikan batasan secara definitif sebagai berikut: sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian utamanya, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan gangguan kelestarian.

2. Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya pengelolaan sampah di perkotaan terdiri atas beberapa tahapan proses, antara lain pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, serta pembuangan akhir (Kastaman, 2007:21).

a. Pewadahan Sampah

Pewadahan sampah adalah awal proses dari pengelolaan sampah yang merupakan usaha menempatkan sampah dalam suatu wadah atau tempat agar tidak berserakan, mencemari lingkungan dan estetika. Alatnya dinamakan tempat sampah. Pewadahan sampah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pewadahan Individual

Pengadaan wadah sampah ini dilakukan oleh masing-masing individu pemilik bangunan atau rumah tersebut. Umumnya diterapkan di daerah komersial, perkantoran, dan pemukiman yang teratur.

2) Pewadahan Komunal

Pengadaan wadah sampah komunal umumnya diterapkan di daerah pemukiman yang tidak teratur (dari segi bangunan dan jalan), pemukiman yang masih jarang penduduknya, dan di pasar dengan ukuran bak sampah yang besar.

b. Pengumpulan Sampah

Sistem pengumpulan sampah untuk daerah perkotaan dilakukan oleh petugas organisasi format baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah

(Pemda), petugas dari lingkungan masyarakat setempat ataupun dari pihak swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Sampah yang dikumpulkan kemudian dipersiapkan untuk proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan atau pembuangan akhir. Sistem pengumpulan dapat dilaksanakan dengan cara:

1) Pengumpulan Individual (*door to door*), yaitu:

Pengumpulan sampah dari rumah dengan alat angkut jarak pendek (misalnya; truk atau gerobak sampah) untuk diangkut ke TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) terdekat.

2) Pengumpulan Komunal, yaitu:

Pengumpulan sampah dari beberapa rumah yang dilakukan pada suatu titik pengumpulan. Pola komunal ini dirasakan sangat tepat untuk daerah permukiman yang penduduknya memiliki penghasilan menengah ke bawah atau pada daerah permukiman yang tidak teratur, dimana kondisi jalannya tidak dapat dilalui oleh alat pengumpul sampah (truk atau gerobak sampah).

c. Pemindahan Sampah

Pemindahan sampah berdasarkan SNI 3242-2008 adalah memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan secara langsung atau melalui tempat penampungan sampah sementara (TPS). Proses pemindahan sampah dilakukan di TPS Terpau dan lokasi wadah sampah komunal ataupun ke kontainer terdekat dengan sumber sampah.

d. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan sampah berkaitan dengan kegiatan membawa sampah dari lokasi pemindahan ke lokasi pembuangan akhir. Menurut SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di permukiman pengangkutan sampah residu dari TPS/TPS Terpadu ke TPA dilakukan bila kontainer telah penuh dan sesuai dengan jadwal pengangkutan yang telah dikonfirmasi dengan pengelola sampah kota.

e. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah upaya yang sangat penting untuk mengurangi volume sampah dan mengubah sampah menjadi material yang tidak berbahaya. Pengolahan dapat dilakukan di sumber, di TPS, maupun di TPA. Prinsipnya adalah dilakukan setelah pemilahan sampah untuk digunakan kembali (Kastaman, 2007:21).

3. Jenis-Jenis Sampah

Setiap hari manusia menghasilkan sampah yang jenisnya tergantung dari aktivitasnya. Setiap jenis sampah memiliki metode pengolahan yang berbeda. Oleh karena itu, kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan, atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lain. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya jenis sampah secara umum menurut data Dinas Pekerjaan Umum dalam Kastaman (2007:72) dapat dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya yaitu:

a. Sampah Organik

Yaitu sampah yang susunannya terdiri atas bahan organik yang mempunyai sifat yang mudah membusuk jika dibiarkan dalam keadaan basah. Sampah organik atau sering disebut sampah basah adalah jenis sampah yang beraal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan dapat hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, nasi, dan potongan rumput/daun/ranting dari kebun. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari sampah organik setiap harinya. Pembusukan sampah organik terjadi karena proses biokimia akibat penguraian materi organik sampah itu sendiri oleh mikroorganisme (makhluk hidup yang sangat kecil) dengan dukungan faktor lain yang terdapat di lingkungan. Metode pengolahan sampah organik yang paling tepat tentunya adalah melalui pembusukan yang dikendalikan, yang dikenal dengan pengomposan atau komposting.

b. Sampah Non Organik

Sampah non organik atau sampah yang tidak mudah busuk. Sampah non organik atau sampah kering atau sampah yang tidak mudah busuk adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari sumber daya alam tidak terbaharui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari industri. Contohnya adalah gelas, plastik, tas plastik, kaleng dan logam. Sebagian sampah non organik tidak dapat diuraikan oleh alam sama sekali, dan sebagian lain dapat diuraikan alam waktu yang sangat lama. Mengolah sampah non organik erat hubungannya dengan

pengehematan sumber daya alam yang digunakan untuk membuat bahan-bahan tersebut dan pengurangan polusi akibat proses produksinya di dalam pabrik.

Tabel 3.1 Pengelompokan Sampah

Jenis Sampah	Lama Hancur
Kertas	2-5 Bulan
Kulit Jeruk	6 Bulan
Filter Rokok	10-12 Tahun
Kantong plastik	10-20 Tahun
Plastik	50-80 Tahun
Aluminium	80-100 Tahun
Styrofoam	Tidak Hancur

Sumber : www.sanitasi.net

Sedangkan sampah berdasarkan sumbernya terdapat empat jenis sampah,

Gumbira (1977:12) :

a. Sampah Domestik

Sampah ini berasal dari lingkungan perumahan ataupun pemukiman, baik di perkotaan maupun pedesaan. Ragam sampah perkotaan biasanya lebih banyak serta jenis sampah anorganiknya secara kuantitatif dan kualitatif lebih kompleks. Sampah pedesaan umumnya lebih berupa bahan organik sisa pertanian, sedangkan sampah anorganiknya lebih sedikit.

b. Sampah Komersial

Yang dimaksud sampah komersial tidaklah berarti sampah mempunyai nilai ekonomi untuk dapat diperdagangkan, tetapi lebih merujuk kepada jenis kegiatan yang dihasilkan dari lingkungan perdagangan seperti

toko, warung, restoran, swalayan. Keragaman jenis sampahnya sangat tinggi, dapat berupa organik maupun anorganik.

c. Sampah Industri

Sampah ini merupakan hasil samping kegiatan industri, yang jenisnya sangat bergantung pada kegiatan industri itu sendiri.

d. Sampah Alami dan Lainnya

Jenis sampah ini dapat berupa dedaunan, sisa bencana alam dan lain-lain. Selain itu dapat juga berupa sampah yang dihasilkan oleh taman, tempat rekreasi, kendaraan umum dll.

G. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*reduce, reuse, dan recycle*)

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Peran serta masyarakat penting karena peran serta merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, masyarakat lebih mempercayai proyek/program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan (LP3B Buleleng-Clean Up Bali dalam Faizah, 2008). Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut M Gempur Adnan, Deputy II Bidang Pengendalian Pencemaran Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam Faizah (2008), mengatakan bahwa:

“sebagai pengganti sistem penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir yang banyak diprotes masyarakat, pemerintah kini mendorong penerapan pengelolaan sampah dengan sistem 3R (*reuse, reduce, dan recycle*) pada skala kota. Program pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip penggunaan kembali, daur ulang dan pengurangan (*reuse, recycle, reduce / 3R*) ini bermanfaat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan prinsip tersebut jumlah sampah yang dibuang ke TPA tinggal 35 persen sehingga meringankan beban TPA sekaligus memperpanjang masa pemakaiannya”.

Paradigma baru dalam pengelolaan sampah lebih menekankan pada pengurangan sampah dari hulu/sumber untuk mengurangi jumlah timbulan sampah serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari sampah. Undang-undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif sejak hulu sampai hilir. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Prinsip 3R sejalan dengan paradigma baru pengelolaan sampah perkotaan yang menitik beratkan pada pengurangan sampah dari sumbernya.

Pada tingkat perumahan atau kelurahan, dilakukan kegiatan pengurangan sampah melalui program 3R. Berdasarkan buku profil TPST Mulyoagung Bersatu tahun 2011, *Recycling* Merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti 6 macam jenis limbah bernilai ekonomis dari sampah yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula. *Reuse* Merupakan teknik pengolahan sampah yang hampir sama dengan *recycling*, bedanya reuse langsung digunakan tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Selanjutnya *Reduce* Adalah usaha untuk mengurangi potensi timbulan sampah, misalnya tidak menggunakan bungkus kantong plastik yang berlebihan.

Menurut Faizah (2008), dalam pengelolaan menuju *zero waste*, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang dilakukan secara teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Dalam mencari fakta-fakta ini diperlukan usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan alasan bahwa dalam penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran untuk mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi dilokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009:1) adalah:

“Metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sugiyono (2009:3) bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat peneliti dilapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan akurat

mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dan lebih lanjut penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Dan Recycle*).

B. Fokus Penelitian

Moleong (2006:237) mengatakan bahwa penentuan fokus penelitian akan membatasi studi, sehingga penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak dan penentuan fokus yang tepat akan mempermudah penyaringan informasi yang masuk. Jadi ketajaman analisis penelitian dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita dalam menentukan fokus penelitian yang tepat.

Adanya fokus penelitian dapat mempermudah dalam mengambil data serta mengolahnya menjadi sebuah kesimpulan. Fokus dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST):

- a. partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST, yakni ;

Keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha merealisasikan aspirasinya dengan jalan menyumbangkan pikiran dan inisiatifnya dalam rapat resmi dan tidak resmi

- b. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan TPST,

yaitu;

Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, maupun uang.

- c. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan TPST

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

2. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R meliputi :

- a. Pra Pengelolaan, yaitu proses awal dalam pengelolaan sampah seperti pewadahan.
- b. Proses Pengelolaan, yaitu proses yang meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengkomposan.
- c. Pasca Pengelolaan, meliputi partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk (hasil olahan), dan partisipasi masyarakat dalam memasarkan produk (hasil olahan).

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Sedangkan situs penelitian adalah merupakan tempat dimana sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Desa Mulyoagung.
2. Kantor Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung
3. Masyarakat Desa Mulyoagung

Adapun alasan dari peneliti memilih lokasi dan situs penelitian yang disebutkan diatas, adalah:

Alasan metodologis penelitian pada Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, yang merupakan sebuah perkotaan yang berada diwilayah Kabupaten Malang yang memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang merupakan hasil dari inisiatif masyarakat untuk mengelola sampah secara terpadu yang diharapkan dapat menghasilkan nilai ekonomis.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber data

1. Informan, yaitu orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi. Informan dipilih secara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010:392) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan,

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

2. *Key Informan*, yaitu merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki obyek penelitian, seperti Kepala Desa Mulyoagung dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung.

3. Dokumen, yaitu sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis seperti undang-undang, bahan-bahan laporan, dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang tersedia dan memiliki relevansi dengan focus penelitian.

4. Peristiwa, yaitu berbagai peristiwa, situasi ataupun kejadian yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di TPST dengan Partisipasi Masyarakat Desa Mulyoagung.

b. Jenis data

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (marzuki, 2002:55). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dengan subyek yang diwawancarai antara lain dengan Aparat Desa Mulyoagung, KSM dan Masyarakat Desa Mulyoagung.

Lokasi TPST Serta Kantor Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari biro statistic, majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2002:56).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip, serta data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Tak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah, wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. (Sugiyono, 2010:413)

2. Obsevasi Nonpartisipan

Menurut Sugiyono (2008:145), dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Karena peneliti hanya mengamati bagaimana proses pengelolaan sampah terpadu. Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reuse, recycle dan reduce).

3. Dokumentasi

Tenik dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pencatatan sumber-sumber data yang ada pada lokasi

penelitian. Data ini merupakan data sekunder dan data-data pada umumnya sudah ada, antara lain yaitu arsip-arsip, dokumen atau surat keputusan, laporan-laporan, dan lain sebagainya.

Tenik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap dan belum berubah.

Dalam menggunakan metode dokumentasi ini peneliti memegang *Checklist* untuk mencari variable yang sudah ditentukan. Apabila terdapat atau muncul variable yang dicarai, maka tinggal membubuhkan tanda *check* ditempat yang sesuai untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum ditentukan dalam daftar variable peneliti dapat menggunakan kalimat bebas (Arikunto, 2002:206).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menunjuk pada alat yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, Moleong (2006:4) mengemukakan bahwa salah satu ciri penelitian kualitatif adalah manusia sebagai alat sehingga peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alternative pengumpul data utama. Sebab hanya manusia sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau dengan obyek-obyek lainnya dan hanya

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

2. *Interview Guide*, yang memberikan pedoman untuk mempermudah wawancara.

3. *Field Note*, buku catatan lapangan yang berguna untuk mencatat informasi, uraian yang bersifat non verbal yang diperoleh selama penelitian.

4. Perangkat Penunjang, alat tulis-menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan, serta kamera dan *tape recorder*.

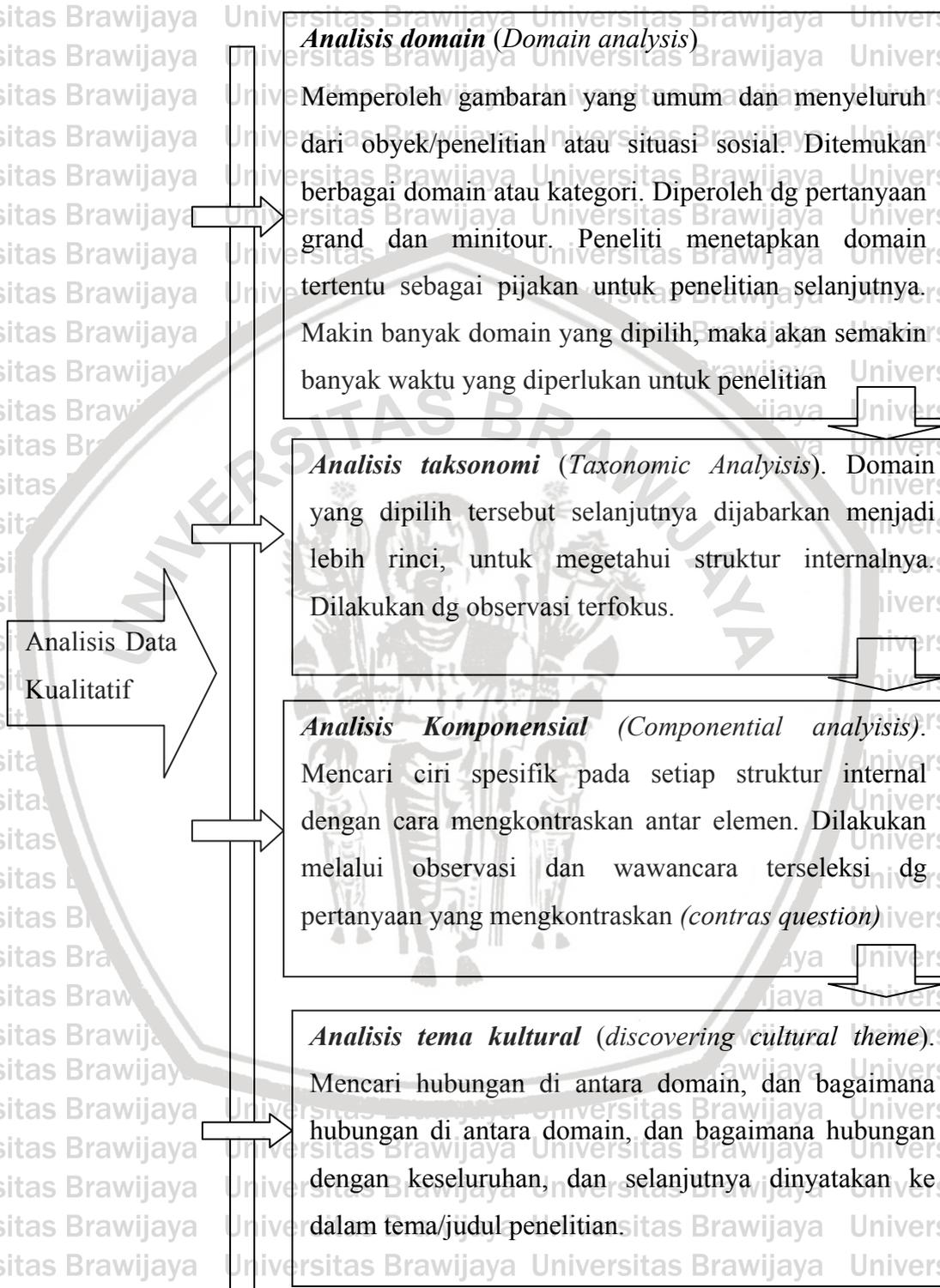
G. Metode Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisa data merupakan bagian yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisa data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang diperoleh. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2009:248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisir data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai macam dengan teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan dokumentasi. Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti ditantang untuk menentukan sendiri metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan.

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Spradley. Teknik analisis data menggunakan model Spradley ini tidak terlepas dari keseluruhan penelitian. Keseluruhan proses penelitian terdiri atas pengamatan deskriptif, analisis dokumen, pengamatan terfokus, analisis taksonomi pengamatan terpilih, analisis komponen, dan diakhiri dengan analisis tema. Jadi proses penelitian berangkat dari yang luas, kemudian memfokus, dan silih berganti antara pengumpulan data dengan analisis data sampai nanti pada akhirnya keseluruhan masalah penelitian akan terjawab.

Seperti yang dikemukakan Spradley dalam Sugiyono (2010:441) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan empat tahapan yaitu: analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis kultural. Secara lebih detail tahapan penelitian tersebut digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut



Gambar 3.1 Macam analisis data kualitatif Spradley dalam Sugiono (2010:441).

Analisis data model Spradley di atas dilakukan melalui empat tahap yang apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Domain. Analisis domain dilakukan saat peneliti memasuki objek penelitian yaitu Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang setelah melakukan pengamatan deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari pengamatan deskriptif ini adalah suatu gambaran umum secara menyeluruh dan berbagai domain terkait masalah Partisipasi masyarakat dalam Pembagunan dan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R.
2. Analisis Taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan dengan menentukan domain-domain tertentu yang dijadikan objek penelitian. Setelah ditemukan berbagai kriteria dari analisis domain maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis taksonomi dengan cara menentukan dan mengelompokkan berbagai kategori yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan TPST, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R. Analisis ini dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan terfokus.
3. Analisis Komponensial. Analisis komponensial ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara terseleksi untuk mencari ciri spesifik pada setiap struktur di suatu bidang. Dari analisis komponensial ini diperoleh beberapa data antara lain bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPST,

serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di

Desa Mulyoagung.

4. Analisis Tema Kultur. Dilakukan dengan cara mencari hubungan di antara

domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya

dinyatakan dalam sebuah tema/judul penelitian. Dari hasil analisis tema

kultural ini diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan antara pasrpartisipasi

masyarakat dengan keberlanjutan proses pengelolaan sampah di TPST.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Malang

a. Keadaan Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Secara geografis Kabupaten Malang terletak diantara $112^{\circ} 17' 10,90''$ sampai $122^{\circ} 57' 00''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ sampai $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang Selatan yang batas-batasnya sebagai berikut

- 1) Wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto,
- 2) Wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang,
- 3) Wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri,
- 4) Wilayah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Posisi ini menjadikan Kabupaten Malang menyimpan potensi bahari yang cukup besar. Berdasarkan kondisi topografinya Kabupaten Malang dapat digolongkan dalam beberapa wilayah dataran. Dataran rendah dengan ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut, daerah dataran tinggi, daerah perbukitan kapur, daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno dengan ketinggian 500-3.300 meter

di atas permukaan laut, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur dengan ketinggian antara 500-3.600 meter di atas permukaan laut.

b. Keadaan Demografi Kabupaten Malang

Secara umum masyarakat di wilayah Kabupaten Malang heterogen dalam etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan kota yang cenderung dinamis. Sebagai salah satu kota pendidikan, masyarakat Kabupaten Malang dengan budaya lokalnya telah lama berinteraksi dan berasimilasi dengan kebiasaan dan budaya dari berbagai macam suku bangsa yang datang dan dibawa oleh para pelajar, mahasiswa serta kalangan pedagang. Dari beberapa suku yang berada di kabupaten Malang, mayoritas penduduk berasal dari etnis Jawa dan Madura. Bahwa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari penduduk adalah Bahasa Jawa Malang, Bahasa Madura dan Bahasa Indonesia. Ciri khas lain dari masyarakat Kabupaten Malang yang majemuk adalah sifat toleransi dan kerjasamanya yang tinggi dalam kehidupan beragama, sehingga menjadikan kota ini cukup aman dengan terciptanya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama.

pertumbuhan penduduk 1,08% setiap tahunnya menunjukkan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Malang dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang. Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang membawahi 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Dinas. Setiap UPTD mempunyai daerah pelayanan persampahan masing-masing. Prinsip penanganan sampah di Kabupaten Malang diawali dengan adanya timbunan sampah yang berasal dari berbagai sumber sampah seperti perumahan, pasar, sekolah, dan terminal, dikumpulkan, ditampung di TPS kemudian diangkut dan dibuang ke TPA. Sistem yang dijalankan dalam pengelolaan sampah masih berupa paradigma lama yaitu kumpul, angkut dan buang dan masih sangat kecil upaya yang mengarah ke konsep 3 R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Saat ini Kabupaten Malang mempunyai 6 (enam) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ada 4 (empat) TPA yang sudah dioperasikan, yaitu:

1. TPA Randuagung Singosari, melayani daerah:

a. UPTD Singosari

b. UPTD Pujon

2. TPA Paras Poncokusumo, melayani daerah:

a. UPTD Tumpang

3. TPA Talangagung Kepanjen, melayani daerah:

a. UPTD Kepanjen

b. UPTD Bululawang

c. UPTD Turen

4. TPA Rejosari Bantur melayani daerah:

a. UPTD Pagak

Dan 2 TPA yang masih belum dioperasikan, yaitu: TPA Pujon dan TPA Kasri Bululawang. Secara prinsip, sistem pengelolaan sampah pada setiap UPTD adalah sama, yaitu menangani sampah dari TPS ke TPA masing-masing. Dari sumber timbunan sampah ke lokasi TPS ditangani oleh kebersihan lingkungan khususnya untuk permukiman/perumahan, kecuali seperti pasar yang langsung di buang ke TPA, atau industri yang berada di wilayah Kabupaten Malang. Namun dalam pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sampah di lapangan, UPTD melakukan pengaturan sendiri-sendiri sesuai dengan karakteristik daerah pelayanan, jarak jangkauan pelayanan, kemampuan alat dan petugas dan lain-lain pertimbangan.

Dalam mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi terhadap semua program pengelolaan sampah yang dimulai pada skala kawasan (tingkat kecamatan), kemudian dilanjutkan pada skala yang lebih luas lagi. Dalam melakukan pengelolaan sampah mengacu pada amanat yang telah ditetapkan dalam perda dan Undang-Undang yaitu:

1. Perda Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penataan dan pengelolaan sampah

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah partisipasi masyarakat merupakan aspek yang terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengelolaan sampah secara terpadu.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan untuk membantu mengurangi masalah persampahan di Kabupaten Malang. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola sampah dapat diupayakan dengan membudayakan penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) yaitu sistem yang dilakukan dengan cara memisahkan sampah yang masih bisa di daur ulang dan dimanfaatkan dengan sampah organik untuk pupuk kompos dan sampah residu.

Apabila disetiap wilayah Kabupaten Malang melakukan pengelolaan sampah dengan cara memilah dan mengolah, maka permasalahan sampah diyakini akan dapat terselesaikan dengan baik dan efisien.

3. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

a. Kecamatan Dau

1. Keadaan Umum

Kecamatan Dau merupakan salah satu kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang yang terletak dibelahan Barat ± 8 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang (Kantor Bupati Malang) dan ± 32 Km dari Ibukota Kabupaten Malang yaitu Kepanjen. Secara Geografis, wilayah Kecamatan Dau terletak pada ketinggian antara 600-2.100 meter dari permukaan laut dengan curah hujan rata 1.297 s/d 1.925 mm/tahun. Batas-batas wilayah meliputi :

1. Utara : Kecamatan Karangploso

2. Timur : Kota Malang

3. Selatan: Kecamatan Wagir / Pegunungan Kawi

4. Barat : Kota Batu

2. Kecamatan Dau terdiri dari 10 Kelurahan/Desa, yaitu:

- a. Desa Kucur
- b. Desa Kalisongo
- c. Desa Karangwidoro
- d. Desa Petungsewu
- e. Desa Selorejo
- f. Desa Tegalweru
- g. Desa Landungsari
- h. Desa Mulyoagung
- i. Desa Gadingkulon
- j. Desa Sumbersekar

3. Luas Wilayah Kecamatan Dau

Luas wilayah Kecamatan Dau adalah ±5.602.671 Ha dengan distribusi peruntukan tanah :

- Pemukiman : 952.000 Ha
- Sawah : 745.000 Ha
- Tanah Kering : 3.146.056 Ha
- Fasum : 17.597 Ha (Lapangan dan Makam)
- Lain-lain : 732.018 Ha

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Dau sampai bulan Desember 2011 adalah 62.875 orang, yang terdiri dari 31.675 penduduk laki-laki dan 31.203 penduduk perempuan.

Tabel. 4.1

Jumlah Penduduk Kecamatan Dau Periode Desember 2011

No.	Desa	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	Desa Kucur	2.840	2.804	5.644
2.	Desa Kalisongo	3.668	3.590	7.258
3.	Desa Karangwidoro	2.833	2.722	5.555
4.	Desa Petungsewu	1.615	1.616	3.231
5.	Desa Selorejo	1.674	1.649	3.323
6.	Desa Tegalweru	1.621	1.589	3.210
7.	Desa Landungsari	4.757	4.555	9.312
8.	Desa Mulyoagung	7.650	7.315	14.965
9.	Desa Gadingkulon	1.884	1.870	3.754
10.	Desa Sumbersekar	3.130	3.493	6.623
	Jumlah	31.672	31.672	62.875

Sumber: Kecamatan Dau

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk terbanyak berada di wilayah Desa Mulyoagung dengan jumlah 14.963 jiwa, dikarenakan Desa Mulyoagung memiliki wilayah yang paling luas diantara desa lainnya. Desa Landungsari dengan jumlah 9.312 jiwa, Desa Kalisongo dengan 7.258 jiwa, Desa Sumbersekar dengan jumlah 6.623 jiwa, Desa Kucur dengan 5.644 jiwa, Desa Karangwidoro dengan 5.555 jiwa, Desa Gadingkulon dengan 3.754 jiwa, Desa

Selorejo dengan 3.323 jiwa, Desa Petungsewu dengan 3.231 jiwa dan yang terakhir Desa Tegalweru dengan 3.210 jiwa.

Tabel. 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	5.755
2.	Buruh Tani	3.923
3.	Usaha Perikanan/Peternakan	36
4.	Jasa Bangunan	1.219
5.	Pedagang	2.579
6.	Jasa Angkutan	1.500
7.	PNS	2.916
8.	TNI/POLRI	3.01
9.	Pekerja Industri	947
10.	Penduduk Menganggur	1.610

Sumber: Kecamatan Dau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas pekerjaan penduduk Kecamatan Dau sebagian besar adalah di sektor pertanian. Pilihan pada sektor ini sangat logis, karena dengan hamparan tanah yang luas, subur dan sebagian terletak pada lereng pegunungan sangatlah cocok untuk pengembangan pertanian baik pertanian pangan, pertumbuhan maupun hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran).

b. Desa Mulyoagung

1. Keadaan Umum Desa Mulyoagung

a. Luas Desa : 596.356 Ha

b. Batas Wilayah

- 1) Barat : Kecamatan Junrejo
- 2) Selatan : Kecamatan Dau
- 3) Utara : Kecamatan Karangploso
- 4) Timur : Kecamatan Lowokwaru

2. Data Penduduk

Tabel. 4.3
Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung Berdasarkan Umur

No.	Indikator	Jumlah (jiwa)
1.	0 - 12 bulan	408
2.	>1 - <5 tahun	888
3.	>6 - <13 tahun	1.562
4.	>14 - <20 tahun	1.525
5.	>21 - <40 tahun	3.550
6.	>41 - 58 tahun	3.252
7.	>59 tahun	635

Sumber: Desa Mulyoagung

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang paling banyak di Desa Mulyoagung adalah penduduk yang berumur antara >21 - <40

dengan jumlah 3.550 jiwa, dan ini menunjukkan jumlah penduduk tersebut merupakan penduduk yang masih produktif.

Tabel. 4.4
Jumlah Penduduk Desa Mulyoagung Berdasarkan Gender

No.	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Keterangan
1.	Jumlah Penduduk	11.927	14.965	+ 3.038
2.	Jumlah Penduduk Laki-laki	6.143	7.650	+ 1.507
3.	Jumlah Penduduk Perempuan	5.784	7.315	+ 1.531

Sumber: Desa Mulyoagung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi jumlah penduduk terbesar adalah penduduk laki-laki dengan jumlah 7.650 orang dan perempuan dengan jumlah 7.315 orang.

3. Bidang Pemerintahan

Tabel. 4.5
Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan

No.	Aparat	SD	SMP	SMA	SI	S2
1.	Kepala Desa			V		
2.	Sekretaris Desa				V	
3.	Kepala Dusun	V	V	V		
4.	Kepala Urusan		V	V		
5.	Kepala Umum		V	V	V	
6.	Staff			V	V	

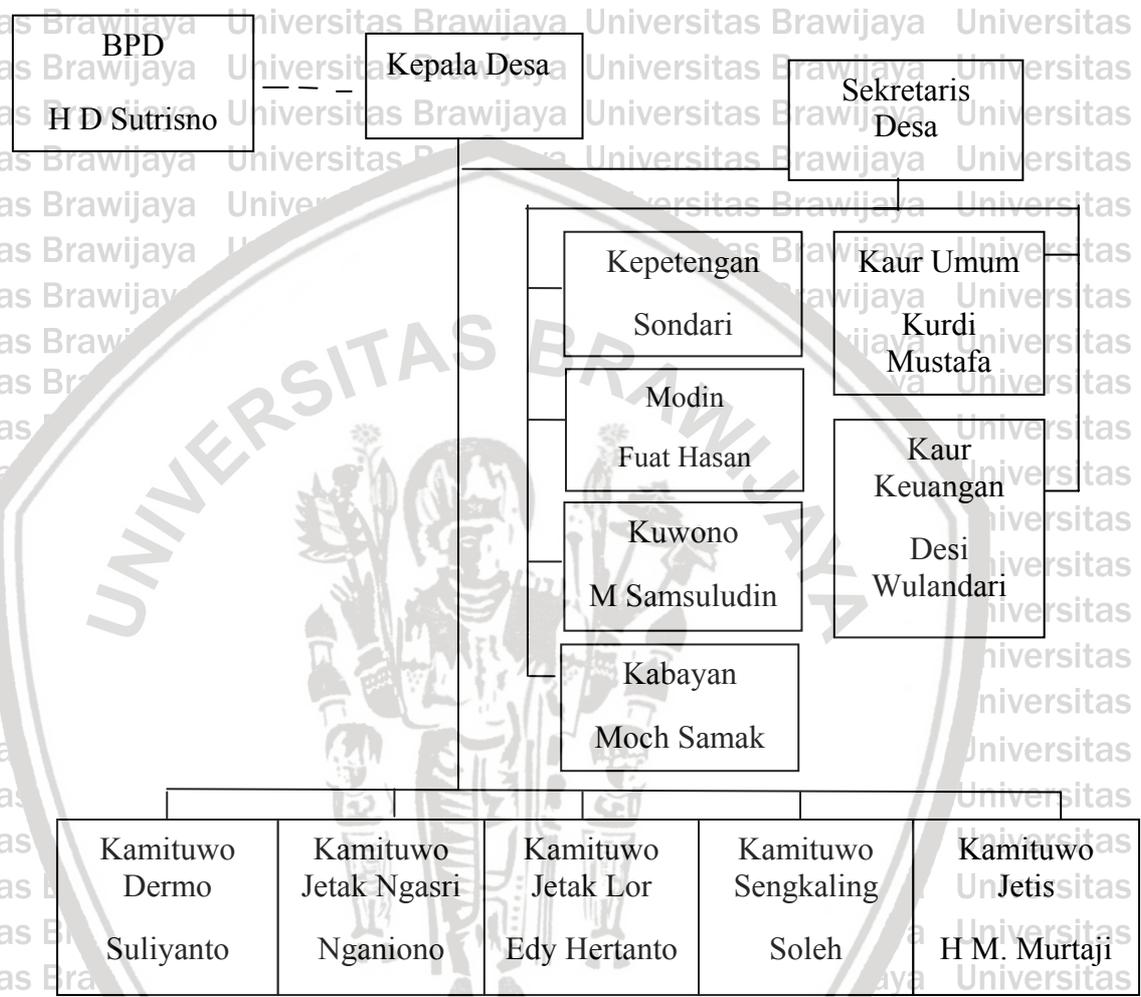
Sumber: Desa Mulyoagung

4. Struktur Organisasi Desa Mulyoagung

Struktur organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya, karena struktur tersebut merupakan suatu kerangka yang menunjukkan tentang kedudukan, tugas, fungsi serta menunjukkan hubungan bagian-bagian dalam organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Berikut adalah struktur organisasi Desa Mulyoagung.



STRUKTUR ORGANISASI DESA MULYOAGUNG



Keterangan:

- 1. ———— Garis Komando
- 2. - - - - - Garis Koordinasi

Gambar. 4.2
Struktur Organisasi Desa Mulyoagung

c. Kelompok Swadaya Masyarakat Mulyoagung Bersatu

1. Sejarah KSM Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyoagung Bersatu

Pada mula terjadinya pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu adalah di Desa Mulyoagung yang memiliki luas wilayah 296594 Ha dan dengan tingkat populasi penduduk mencapai 3970 Kepala Keluarga merupakan salah satu desa yang cukup padat penduduk. Pertambahan penduduk yang disertai dengan tingginya arus urbanisasi ke perkotaan telah menyebabkan semakin tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari. Apalagi volume sampah yang dihasilkan setiap harinya oleh tiap rumah warga tidak kurang dari 7.940 kg dan hal ini masih belum termasuk sampah dari rumah produksi di wilayah Desa Mulyoagung jadi dapat diperkirakan bahwa total keseluruhan volume sampah yang dihasilkan oleh Desa Mulyoagung setiap harinya rata-rata mencapai 8 sampai dengan 9 ton sampah.

Sebelum adanya TPST, sampah yang telah dikumpulkan setiap harinya dibuang begitu saja di daerah kosong yang berdekatan dengan aliran sungai brantas. Melalui musyawarah kelompok bersama atau yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di Desa Mulyoagung yang diketuai oleh Bapak F. Supadi pada tahun 2008 berusaha untuk mencari solusi dari ancaman pencemaran lingkungan khususnya pada aliran sungai brantas. Dari solusi yang ditawarkan oleh KSM Desa Mulyoagung maka keluarlah ide untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi akhir

dari permasalahan sampah yang sebelumnya hanya dibuang di daerah aliran sungai Brantas.

KSM berusaha mengajukan proposal ke badan atau instansi untuk pendanaan selain pendanaan dari swadaya masyarakat sendiri. Setelah dana telah terhimpun, maka dibangunlah Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang berlokasi di Desa Mulyoagung dan mulai beroperasi pada akhir bulan Desember tahun 2010.

2. Visi dan Misi KSM Mulyoagung Bersatu

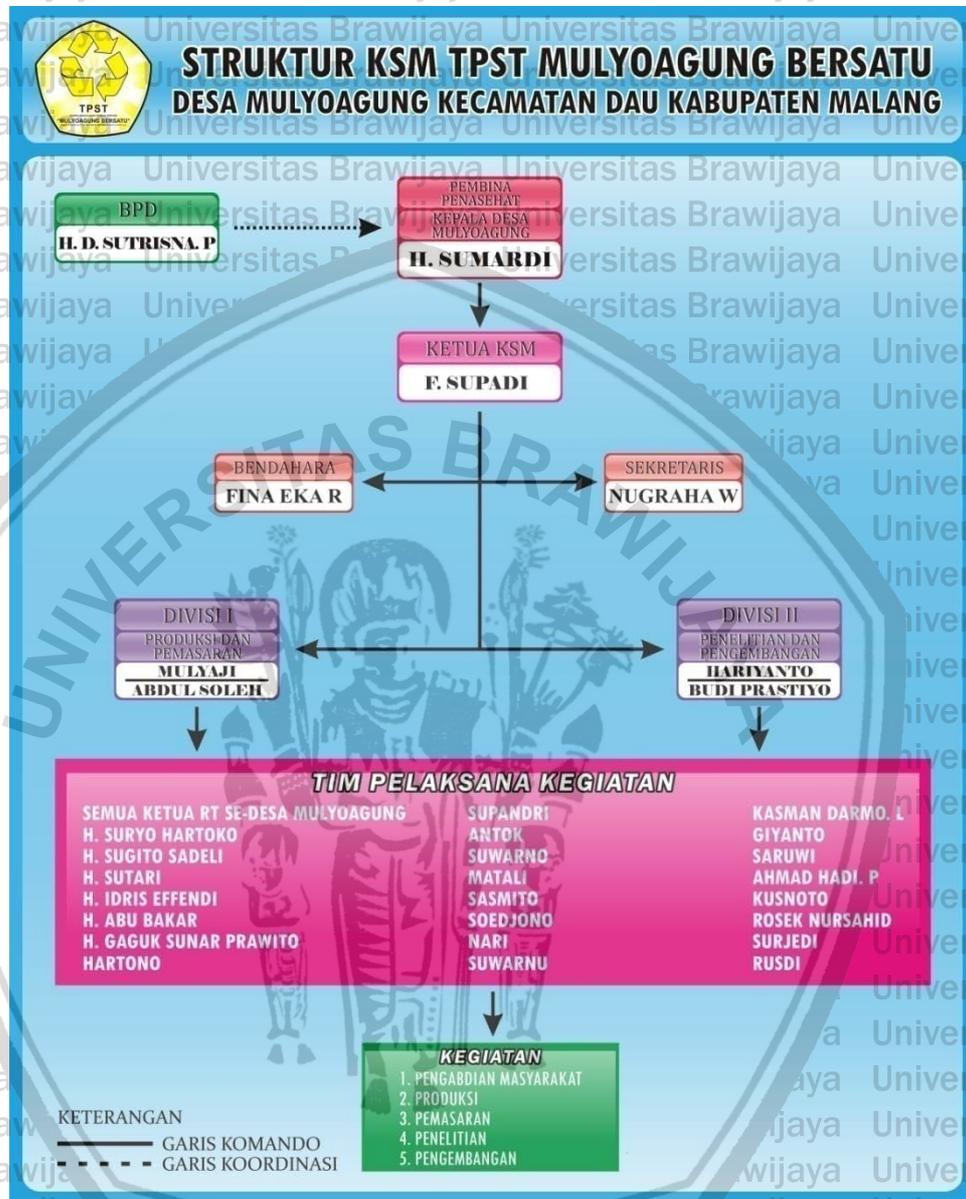
a. Visi

“menciptakan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman di Desa Mulyoagung”.

b. Misi

- 1) Membantu pemerintah dalam rangka upaya meningkatkan kebersihan lingkungan.
- 2) Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan sampah secara terpadu.
- 3) Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif berbasis sampah.
- 4) Meningkatkan kerjasama serta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

3. Struktur KSM TPST Mulyoagung



Gambar. 4.3
Struktur KSM Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)
Sumber: KSM TPST Mulyoagung Bersatu

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memegang peranan yang sangat penting, karena demi suksesnya pembangunan dan pencapaian hasil yang baik membutuhkan perencanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam hal perencanaan yang akan dibahas disini bukanlah masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi melalui wakil-wakilnya, seperti Ketua RT/RW masing-masing lingkungan warga, tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat melalui perwakilannya dalam hal perencanaan diwujudkan dalam sebuah forum seperti rapat yang membahas tentang rencana yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mulyoagung. Menurut Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung mengatakan bahwa:

“...dalam perencanaan pembangunan TPST masyarakat sangat antusias sekali, soalnya kan selama ini kalau membuang sampah di pinggir DAS brantas. Ide pembangunan TPST ini memang berasal dari masyarakat yang akhirnya direspon baik oleh pemerintah karena memang sangat membutuhkan TPST agar tidak membuang sampah di pinggir sungai lagi...” (wawancara 18-12-12, hari selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM bahwa:

“...rencana pembangunan TPST ini ide awalnya dari masyarakat, masyarakat butuh pengelolaan sampah yang baik supaya tidak mencemari lingkungan. Karena selama ini sampah tidak pernah di olah tapi langsung dibuang di pinggiran DAS brantas...” (wawancara 20-12-12, hari kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Lebih lanjut lagi menurut Bapak Supadi bahwa:

“...karena partisipasi masyarakat ini bagus makanya direspon oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab.Malang dibawah binaan Bapak Kodri dan Bapak Renung untuk dibangun TPST...” (wawancara 20-12-12, hari kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, masyarakat Desa Mulyoagung yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Mulyoagung yang peduli terhadap kelestarian lingkungan berusaha untuk menciptakan solusi dari permasalahan sampah yang ada di Desa Mulyoagung. Dari solusi yang ditawarkan oleh KSM Desa Mulyoagung maka keluarlah ide untuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai solusi akhir dari permasalahan sampah yang sebelumnya hanya dibuang di daerah aliran sungai Brantas. Aspirasi dari masyarakat ini lalu direspon oleh pemerintah. Proses dalam pembangunan TPST dapat dilihat pada gambar 4.4



Gambar. 4.4 Alur Pembangunan TPST Mulyoagung Bersatu

Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu

Selain itu, aspirasi masyarakat juga meliputi pembentukan pengurus TPST, ketua RT/RW sepakat untuk menjadi pengurus TPST yang tergabung menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), serta kesanggupan masyarakat membayar dana pengangkutan sampah dari rumah ke TPST. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung mengatakan bahwa :

“...dalam perencanaan dulu masyarakat menyampaikan usul kalau pengurus TPST ketua RT/RW dan semua RT/RW ini menyanggupi untuk menjadi pengurus TPST serta masyarakat sanggup untuk membayar pengangkutan sampah dari rumah ke TPST...” (wawancara tanggal 22-01-13, Pukul 12.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Untuk mengetahui siapa saja perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat/musyawarah untuk membahas rencana pembangunan TPST yang akan dilaksanakan di Desa Mulyoagung, dapat dilihat pada tabel.4.6 :

Tabel. 4.6 Jumlah Wakil Masyarakat yang Hadir Dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan TPST Desa Mulyoagung Tahun 2009

No.	Wakil Masyarakat	Yang Hadir
1.	Perangkat Desa	8
2.	Ketua RT/RW	39
3.	LPMD	3
4.	BPD	5
5.	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	2
6.	PKK	10
7.	Linmas	3
8.	Tokoh Masyarakat	5

Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu yang diolah penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam rencana pembangunan TPST di Desa Mulyoagung memang diminati dan di inginkan oleh masyarakat, terbukti dari kehadiran perwakilan-perwakilan setiap lembaga desa dan masyarakat dalam musyawarah pembangunan TPST.

b. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan TPST

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPST Desa Mulyoagung dibedakan menjadi partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/material dan dalam bentuk tenaga.

1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/materi

Partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan desa juga dapat dilakukan dalam bentuk swadaya uang/materi. Swadaya uang yang dimaksud ialah hasil sumbangan dari warga masyarakat, sedangkan sumbangan materi dapat berupa bahan-bahan material, makanan dan minuman dan lain-lain. Sumbangan uang/materi ini dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swadaya uang oleh masyarakat, biasanya yaitu kegiatan pembangunan yang biayanya masih dapat dijangkau masyarakat melalui sumbangan iuran.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari informan, partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam pelaksanaan pembangunan TPST tidak sepenuhnya murni dari swadaya masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi Selaku Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Mulyoagung mengatakan bahwa :

“Dana untuk pembangunan TPST diperoleh dari beberapa lembaga yang ada, antara lain :

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebesar ± 200 Juta Rupiah
2. APBN 2010 sebesar 1,2 Miliar Rupiah
3. APBD Kabupaten Malang Sebesar 100 Juta Rupiah
4. Desa Mulyoagung yang berupa lahan seluas ± 4000 m²
5. Serta swadaya masyarakat Desa Mulyoagung sebesar 28 Juta Rupiah.”

(wawancara 20-12-12, hari Kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Untuk pembangunan TPST membutuhkan dana yang cukup besar dan swadaya dari masyarakat belum mencukupi, oleh karena itu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) mengajukan proposal ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendanai pembangunan fisik berserta perlengkapan TPST.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung, mengatakan bahwa:

“...pembangunan fisik TPST serta seluruh perengkapannya sebagian besar dari pemerintah, masyarakat mengajukan proposal ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Dan direspon oleh pemerintah...” (wawancara 18-12-12, hari selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Lebih lanjut lagi, Bapak Sumardi memngatakan bahwa :

“...swadaya dari masyarakat ini berasal dari iuran yang dikumpulkan setiap RT/RW dan besaran iuran setiap RT/RW itu berbeda, dan ini menjadi modal awal dalam pembangunan TPST...” (wawancara tanggal 22-01-13, hari selasa, pukul 12.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, partisipasi masyarakat dalam bentuk materi memang tidak terlalu besar, karena sumber pendanaan pembangunan TPST sebagian besar dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2) Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dan jasa

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pembangunan desanya.

Dalam proses pembangunan TPST masyarakat tidak terlalu banyak memberikan kontribusi, mengingat bahwa sumber pendaan pembangunan

semua berasal dari pemerintah. Sehingga pembangunan fisik TPST semua dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam pembangunan jalan menuju TPST masyarakat ikut berpartisipasi yang didasari dengan semangat gotong royong. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi Selaku Ketua KSM mengatakan bahwa

“Sesuai intruksi kepala desa, masyarakat bekerjabakti dalam pembuatan jalan menuju TPST” (wawancara 20-12-12, hari Kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu).

Hal ini juga dipertegas oleh Bapak Sumardi selaku Kepala Desa Mulyoagung yang mengatakan bahwa :

“...ya memang tidak terlalu banyak masyarakat menyumbangkan tenaga untuk pembangunan TPST, karena semua pembangunan fisik TPST ditangani oleh pemerintah, masyarakat hanya terima jadi saja..” (wawancara 18-12-12, hari Selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Sedangkan partisipasi masyarakat dalam bentuk jasa, masyarakat menyumbangkan pikirannya dalam pembuatan proposal pembangunan TPST untuk mendapatkan respon dari pemerintah. Pembuatan proposal ini hanya diwakili oleh wakil-wakil masyarakat seperti RT/RW dan Tokoh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Dengan adanya pembuatan proposal dan direspon positif oleh pemerintah daerah dan pusat, sehingga dana pembangunan TPST tidak semua ditanggung oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku ketua KSM menyatakan bahwa:

“...masyarakat dalam pembangunan fisik TPST memang tidak ikut berpartisipasi, soalnya kan dana pembangunan sebagian besar dari pemerintah dan untuk pembangunan fisiknya semua sudah menjadi satu

paket di dalam bantuan yang di berikan oleh pemerintah...” (wawancara, hari kamis 27-12-12, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu).

c. Partisipasi Masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan (TPST)

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu diharapkan masyarakat ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua masyarakat hendaknya dapat memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik, namun tidak hanya sebatas mememanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga agar dapat dimanfaatkan generasi yang akan datang.

Dalam hal ini masyarakat Desa Mulyoagung telah memelihara hasil pembangunan TPST dan memanfaatkannya dengan baik. Sehubungan dengan pemeliharaan pembangunan TPST, bentuk partisipasi masyarakat dalam memelihara TPST ini berupa materi, yaitu pembayaran iuran setiap bulan. Penetapan iuran TPST Mulyoagung dibebankan pada setiap rumah yang besaran nominalnya tergantung lokasi rumah dan jenis usaha yang dimiliki oleh rumah tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST Mulyoagung Bersatu menyatakan bahwa:

“...partisipasi masyarakat dalam memelihara untuk keberlangsungan TPST dengan membayar iuran per rumah tiap bulannya, dan penentuan besarnya iuran itu berbeda-beda, kayak rumah biasa dalam kampung itu biasanya Rp. 5.000/rumah tapi kalo perumahan biayanya Rp. 8.000/rumah bisa juga sampai Rp. 12.500/rumah sedangkan untuk rumah uasaha tarifnya sudah beda lagi,

kayak warung makan, kost-kostan dan cateringan dikenai iuran Rp. 250.000, belum lagi tarif untuk hotel dan taman rekreasi rata-rata Rp. 300.000 untuk hotel dan Rp. 400.000 untuk tempat rekreasi...” (wawancara, hari Kamis 27-12-12, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Berikut ini merupakan daftar penetapan besaran biaya iuran untuk warga yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu, lihat pada tabel 4.7

Tabel. 4.7 Daftar Penetapan Iuran TPST Mulyoagung Bersatu

No.	Uraian	Besar Iuran/Bulan
1.	Rumah warga	Rp. 5.000 – Rp. 12.500
2.	Rumah usaha warung makan	Rp. 15.000
3.	Rumah usaha kost (jumlah kost > 8 orang)	Rp. 20.000
4.	Rumah usaha perkantoran/sekolah	Rp. 30.000
5.	Pondok pesantren	Rp. 50.000
6.	Rumah usaha catering	Rp. 250.000
7.	Hotel	Rp. 300.000
8.	Tempat rekreasi	Rp. 400.000

Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu

Dari tabel dapat dilihat bahwa penetapan iuran warga ditentukan dari jenis rumah dan usaha yang ada pada rumah warga tersebut. Sistem pembayaran iuran warga kepada TPST Mulyoagung Bersatu dilakukan mulai tanggal 1 pada setiap awal bulan dan selambat-lambatnya dibayarkan kepada TPST Mulyoagung Bersatu pada tanggal 25 dengan berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) maupun Kepala Dukuh wilayah setempat. Masyarakat tidak keberatan dengan ditariknya iuran sampah setiap bulan. Karena masyarakat sadar bahwa sampah memang perlu ada yang mengelola dan untuk keberlangsungan TPST perlu adanya partisipasi masyarakat. Seperti yang di

sampaikan oleh Bapak Sulkan Warga Dusun Jetak Ngasri RT/RW 02/04 mengatakan bahwa :

“...ya saya nggak keberatan mbak kalau untuk bayar iuran tiap bulan Rp. 5000, karena ini semua kan demi kebaikan bersama agar tercipta lingkungan yang bersih...” (wawancara, hari sabtu 29-12-12, pukul 9.00, di Sawah Bapak Sulkan)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Ketua RT 03 / RW 10 di perumahan Omacampus mengatakan bahwa

“...di oma campus untuk kebersihan sampah disini ditarif Rp. 5000.00/bln mbak, masyarakat tidak keberatan soalnya ini sudah menjadi kewajiban masyarakat” (wawancara, 31-01-13 hari Kamis, pukul 10.30, di Rumah Bapak Sunarto).

Begitu juga di perumahan villa bukit sengkaling, pembayaran iuran sampah tidak dikelola oleh RT/RW akan tetapi dikelola oleh PT pembangunan proyek perumahan nya. Setiap bulan warga ditarif sebesar Rp. 10.000,00/bln untuk pembayaran sampah dan air. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fatik selaku pemasaran dari Villa Bukit Sengkaling, mengatakan bahwa

“untuk iuran kebersihan dan air di villa ini setiap rumahnya ditarif RP.10.000,00/bln nya, dan untuk sampahnya Rp. 5000,00 kita menyetor ke TPSTnya sebesar Rp. 800.000,00/bln” (wawancara, 31-01-13 hari Kamis, pukul 10.15, di Kantor Pemasaran Proyek).

Tabel 4. 8 Data Iuran Warga TPST Mulyoagung Bersatu bulan Januari 2013

No.	Dukuh	RT / RW	Jml h Ru mah	Wajib Retribusi	Total Masuk TPST	Prosentase Masuk TPST (%)
1.	Dermo	RT 01 / RW 01	50	Rp. 5000	Rp. 220.000	88
		RT 03 / RW 01	18	Rp. 6000	Rp. 119.000	100
		RT 04 / RW 01	70	Rp. 5000	Rp. 315.000	90
		RT 05 / RW 01	70	Rp. 2000	Rp. 140.000	100
		RT 01 / RW 02	55	Rp.4500	Rp. 247.500	100
		RT 02 / RW 02	70	Rp. 5000	Rp. 280.000	80
2.	Jetak Ngasri	RW 01 & RW 02	-	-	Rp. 1.460.000	-
3.	Jetak Lor	RW 01	87	Rp. 5000	Rp. 400.000	91
		RW 02	100	Rp. 5000	Rp. 450.000	90
4.	Jetak Lor Villa	RT 01 / RW 03	50	Rp. 9000	Rp. 450.000	100
		RT 02 / RW 03	40	Rp. 9000	Rp. 360.000	100
		RT 03 / RW 03	40	Rp. 9000	Rp. 360.000	100
		RT 04 / RW 03	80	Rp. 9000	Rp. 720.000	100
5.	Sengkaling	RT 01 / RW 04	45	Rp. 5000	Rp. 250.000	100
		RT 02 / RW 04	40	Rp. 5000	Rp. 214.000	100
		RT 03 / RW 04	50	Rp. 6000	Rp. 320.000	100
		RT 01 / RW 03	37	Rp. 6000	Rp. 250.000	100
		RT 02 / RW 03	100	Rp. 5000	Rp. 450.000	90
		RT 03 / RW 03	40	Rp. 7000	Rp. 280.000	100
		RT 01 / RW 05	31	Rp. 2000	Rp. 62.000	100
		RT 02 / RW 05	50	Rp. 2000	Rp. 100.000	100
		RT 03 / RW 05	45	Rp. 2000	Rp. 90.000	100
		RT 04 / RW 05	40	Rp. 2000	Rp. 80.000	100
6.	Sengkaling Indah II	RT 01 / RW 06	21	Rp. 5000	Rp. 100.000	95
		RT 02 / RW 06	35	Rp. 5000	Rp. 100.000	57
7.	Sengkaling Graha	RT 01 / RW 07	25	Rp. 9000	Rp. 230.000	100
8.	Sengkaling	RT 01 / RW 07	60	Rp. 8000	Rp. 513.000	100
		RT 02 / RW 07	58	Rp. 8000	Rp. 414.500	100
		RT 03 / RW 07	50	Rp. 8000	Rp. 425.000	100
		RT 04 / RW 07	48	Rp. 5000	Rp. 127.000	52

9.	Sengkaling Indah I	RW 08	68	Rp. 6000	Rp. 408.000	100
10	Jetis	RT 01 / RW 01	65	Rp. 5000	Rp. 325.000	100
		RT 02 / RW 01	65	Rp. 5000	Rp. 300.000	92
		RT 03 / RW 01	30	Rp. 7000	Rp. 210.000	100
		RT 01 / RW 02	75	Rp. 5000	Rp. 327.500	86
		RT 02 / RW 02	75	Rp. 5000	Rp. 418.500	100
11	Jetis Ulil Abshar	RT 01 / RW 03	50	Rp. 6000	Rp. 328.500	100
12	Jetis TEA1	RT 02 / RW 03	67	Rp. 4500	Rp. 301.500	100
13	Jetis TEA II	RT 01 / RW 04	50	Rp. 6000	Rp. 300.000	100
		RT 02 / RW 04	50	Rp. 6000	Rp. 300.000	100
		RT 03 / RW 04	30	Rp. 6000	Rp. 200.000	100
14	Jetis MSI	RW 05	100	Rp. 5000	Rp. 500.000	100
15	Jetis	RT 01 / RW 10	60	Rp. 4500	Rp. 270.000	100
		RT 02 / RW 10	30	Rp. 4500	Rp. 135.000	100
		RT 03 / RW 10	60	Rp. 2000	Rp. 160.000	100
		RT 04 / RW 10	45	Rp. 4500	Rp. 202.500	100
		RT 05 / RW 10	40	Rp. 4500	Rp. 180.000	100
		RT 06 / RW 10	50	Rp. 7000	Rp. 350.000	100
16	Jts Pondok Indah	RT 07 / RW 10	15	Rp. 9000	Rp. 135.000	100
17	Jetis	RT 08 / RW 10	33	Rp. 4000	Rp. 132.000	100
18	Jetis Bct	RT 01 / RW 12	55	Rp. 8000	Rp. 440.000	100
		RT 02 / RW 12	75	Rp. 8000	Rp. 600.000	100
		RT 03 / RW 12	89	Rp. 8000	Rp. 712.000	100
19	Oma Campus		200	Rp. 5000	Rp 1.000.000	100
20	Warung SS		1	Rp. 250.000	Rp. 250.000	100
21	Hotel UMM INN		1	Rp. 300.000	Rp. 300.000	100
22	Perum LPB		160	Rp. 5000	Rp. 800.000	100
23	KUD Dau		1	Rp. 30.000	Rp. 30.000	100

24	Trs Sengkaling	RT 04 / RW 07	1	-	Rp. 400.000	100
25	Cahaya Catering	RT 03 / RW 07	1	Rp. 250.000	Rp. 250.000	100
26	Pp. Ar-Rohmah		1	Rp. 50.000	Rp. 500.000	100
27	Semanding	RT 01 / RW 01	53	Rp. 6000	Rp. 314.000	100
28	Bumi Asri Blok III	RW 09	215	Rp. 5000	Rp. 1.075.000	100
29	Smp m 06 Jetis		1	Rp. 30.000	Rp. 800.000	100
30	Gudang Agus		1	Rp. 30.000	Rp. 60.000	100
	TOTAL	65			Rp. 22.541.500	

Sumber: TPST Mulyoagung Bersatu

Dari tabel 4.8 dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar iuran setiap RT/RW besarnya tidak sama. Tergantung dari kesepakatan RT/RW setempat. Dapat diketahui 83% dari total jumlah 65 rumah telah membayar iuran penuh kepada TPST, 17% tidak membayar kepada TPST dan 20% membayar dibawah ketentuan pembayaran iuran yang telah ditetapkan.

Hal ini disebabkan karena tingkat ekonomi masyarakat serta rumah masyarakat yang jarang ditempati atau rumah kosong. Seperti yang dikatakan oleh Bapak

Sumardi Selaku Kepala Desa Mulyoagung yang mengatakan bahwa :

“... setiap RT/RW penetapan iuran tidak sama, karena sesuai kesepakatan RT/RW itu sendiri, selain itu tidak semua masyarakat mampu membayar iuran, tidak hanya itu saja kadang ada rumah yang tidak dihuni atau hanya sebagai rumah singgahan saja, biasanya rumah yang tidak dihuni memang nggak dipungut biaya soalnya kan nggak ada sampahnya juga.” (wawancara 18-12-12, hari selasa, pukul 10.00, dikantor Kepala Desa Mulyoagung)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Sunarto selaku Ketua RT 03 / RW 10 di perumahan Omacampus mengatakan bahwa :

“...jumlah penarikan iuran disini setiap bulannya nggak sama mbak, soalnya tergantung dari rumahnya, kadang rumah yang ada disini hanya dihuni kalau *weekend* saja, pas penarikan penghuni rumah tidak ada ya ditarik untuk bulan selanjutnya, jadi double bayar iurannya mbak...” (wawancara, 31-01-13 hari Kamis, pukul 10.30, di Rumah Bapak Sunarto).

Dengan adanya pembangunan TPST ini, sangat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengelola sampah di Desa Mulyoagung dan memberdayakan masyarakat Desa Mulyoagung. seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi selaku ketua KSM mengatakan bahwa :

“...tujuan pembangunan TPST ini adalah untuk mengelola sampah yang ada di Desa Mulyoagung, karena selama ini Desa Mulyoagung membuang sampah secara ilegal di pinggir DAS brantas, dengan adanya TPST diharapkan lingkungan menjadi bersih dan bisa memberdayakan masyarakat...” (wawancara, hari rabu 09-01-13, 16.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Pemberdayaan yang ada yaitu mengajak atau mempekerjakan masyarakat Desa Mulyoagung yang tergolong ekonomi rendah untuk bekerja di TPST, Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung, di TPST sendiri sudah bisa mempekerjakan masyarakat yang berpenghasilan rendah sebanyak 64 orang hal ini mengalami peningkatan. Pada awal beroperasi tahun 2010 TPST hanya mempekerjakan 44 orang, dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel. 4.9 Jumlah Pegawai TPST Mulyoagung Bersatu

No.	Tugas Kerja	Jumlah Pegawai	
		2010	2013
1.	Zona 1 (Pemilah Sampah)	20	22
2.	Zona 2 (Packing Hasil Lapak)	-	7
3.	Zona 3 (Komposting-Packing Pupuk)	6	7
4.	Petugas Angkut	16	20
5.	Sekretaris	-	1
6.	Bendahara	-	1
7.	Staff Umum	1	2
8.	Penjaga	1	4

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung Bersatu

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa TPST Mulyoagung Bersatu telah berhasil dalam memberdayakan warga Desa Mulyoagung, bahkan pegawai TPST pada tahun 2013 ada yang berasal dari luar Desa Mulyoagung, yang secara tidak langsung akan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung. Jumlah pekerja yang berasal dari Desa Mulyoagung sendiri sebanyak 53 orang, dan 11 lainnya berasal dari luar Desa Mulyoagung. Seperti yang dikatan oleh Bapak Supadi bahwa :

“...TPST juga diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa dan sekitarnya dengan mengajak mreka untuk bekerja di TPST ini, dengan begini TPST dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ada...” (wawancara, 27-12-12 hari kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Manfaat dibangunnya TPST Mulyoagung Bersatu selain dapat dirasakan disektor lingkungan juga dapat dirasakan pada sektor ekonomi yaitu, dengan adanya TPST akan membuka peluang lapangan kerja baru untuk warga sekitar.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

Pengelolaan persampahan di Desa Mulyoagung dilaksanakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) TPST Mulyoagung Bersatu. Kepengurusahan KSM ini terdiri dari ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat di Desa Mulyoagung. Proses pengelolaan sampah yang dilakukan adalah meliputi kegiatan pewadahan, pengangkutan dan pengolahan.

a. Pra Pengelolaan

Dalam pra pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya sendiri sehingga memudahkan petugas TPST dalam pengangkutan sampah. Masyarakat mengumpulkan sampah rumah tangga masing-masing dengan menggunakan wadah kantong plastik atau sampah langsung dibuang di tempat sampah. Pewadahan sampah yang dilakukan belum disertai dengan proses pemilahan oleh semua warga masyarakat, sehingga sampah organik masih tercampur dengan sampah anorganik. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.5



Gambar. 4.5 Pewadahan Sampah tanpa Pemilahan

Manfaat dilakukannya pewadahan sampah adalah adanya kesempatan untuk memilah sampah yang masih dapat digunakan, laku dijual atau sampah yang dapat didaur ulang menjadi material lain seperti kompos. Masyarakat di Desa Mulyoagung sebenarnya telah mengetahui dan memahami hal tersebut, akan tetapi sikap yang menganggap bahwa sampah adalah material buangan, serta sampah sudah ada yang mengelola melalui perwakilan kelompok yang ada di Desa Mulyoagung adalah beberapa alasan yang menutup peluang warga untuk melakukan pemilahan atau pengumpulan sampah yang masih dapat digunakan bahkan laku dijual.

Hasil dari wawancara kepada masyarakat Desa Mulyoagung menyatakan bahwa memang masyarakat hanya mewedahi sampahnya tanpa ada pemilahan. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaan warga Desa Mulyoagung membuang sampah tanpa melakukan pemilahan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Yuyun warga RT/RW 5/9 mengatakan bahwa:

“...saya nggak biasa memisahkan sampah mbak, dari dulu sebelum atau sesudah ada TPST ya sampah langsung dibuang di tempat sampah karena

sudah menajadi kebiasaan ya mbak makanya agak sulit kalau membuang sampah harus dipisah-pisah, saya tau kalau sampah seperti plastik aqua, kertas dan kardus bisa di jual, tapi itu kan harus banyak dan dikumpulkan dulu...” (wawancara, hari senin 07-01-13, pukul 16.00, di rumah kediamannya)

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bapak Supadi selaku Ketua KSM mengatakan bahwa :

“...untuk membiasakan masyarakat memilah sampah dari rumah atau sumber sampah itu susah mbak, kan selama ini sebelum dan sesudah ada tpst masyarakat ya sudah terbiasa tinggal membuang sampah di tempat sampah...” (wawancara, hari sabtu 12-01-13, pukul 10.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Namun dari penemuan peneliti ternyata ada masyarakat Desa Mulyagung yang memisahkan sampah yang bisa dijual kembali dan digunakan kembali. Hal ini karena didorong motif ekonomi. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung memisahkan sampah yang bernilai jual untuk menambah penghasilan keluarganya. Menurut Ibu Paniti warga Dusun Dermo RT/RW 1 mengatakan bahwa:

“...saya sama anak saya memang memilah sampah yang laku dijual, sampah-sampahnya itu saya kumpulkan dan nantinya saya jual ke pengepul dan sisa sampah yang nggak bisa dijual ya saya buang ditempat sampah biar diangkut oleh petugas tpst...” (wawancara, hari rabu 09-01-13, pukul 09.00, di rumah kediaman Ibu Paniti)



Gambar. 4.6 Pemilahan Sampah

Ibu Paniti memang sengaja memisahkan sampah yang laku dijual dan tidak laku dijual, karena hasil dari pengumpulan sampah yang laku dijual dapat menambah keuangan Ibu Paniti.

b. Proses Pengelolaan

Proses selanjutnya yaitu proses pengelolaan, diawali dengan pengangkutan sampah-sampah yang telah dikumpulkan masyarakat secara individu.

Pengangkutan sampah dapat dilihat pada gambar. 4.7



Gambar.4.7 Pengangkutan Sampah

Proses selanjutnya dalam pengelolaan sampah memang tidak banyak melibatkan masyarakat. Sampah hanya dikelola oleh perwakilan masyarakat Desa Mulyoagung yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang kepengurusannya terdiri dari RT/RW dan Tokoh Masyarakat Desa Mulyoagung. Pengurus TPST Mulyoagung Bersatu ini sifatnya sukarela yang pengurusnya ditunjuk oleh masyarakat dalam musyawarah desa. Masyarakat yang lainnya hanya berpartisipasi dalam bentuk materiil yaitu membayar iuran sampah setiap bulan untuk biaya operasional TPST. Mengingat bahwa partisipasi masyarakat dalam membiayai operasional TPST ini sangat penting. Karena TPST Desa Mulyoagung merupakan swadaya dari masyarakat sendiri sehingga dana untuk membiayai operasional TPST berasal dari masyarakat bukan pemerintah. Seperti yang dikatan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM mengatakan bahwa:

“...partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah memang tidak ada, masyarakat hanya membayar iuran, pembayaran iuran ini sangat bermanfaat untuk membiayai operasional TPST. Karena TPST ini merupakan swadaya masyarakat jadi untuk biaya operasional ya berasal dari iuran warga dan hasil

penjualan produk TPST...” (wawancara, hari sabtu 12-01-13, pukul 10.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Soleh Selaku Kamituwo Dukuh

Sengkaling mengatakan bahwa :

“...masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, soalnya kan sudah dibangun TPST. Jadi ya TPST yang mengelola sampah. Semua Dukuh juga begitu masyarakat hanya membayar iuran untuk biaya operasional TPST...” (wawancara, hari 18-12-12 selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Berlainan dengan yang disampaikan oleh Bapak Sumardi selaku Kepala

Desa Mulyoagung menyatakan bahwa:

“...peran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat bagus sekali, hal ini ditandai dengan bersedianya masyarakat dalam membayar iuran TPST setiap bulannya, tanpa ada partisipasi masyarakat yang bagus TPST mungkin tidak akan berjalan seperti sekarang...” (wawancara, 18-12-12 hari selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Memang dalam pengelolaan sampah di pada TPST Mulyoagung Bersatu tidak banyak melibatkan masyarakat. Karena sudah sesuai kesepakatan pada waktu musyawarah perencanaan pembangunan TPST, ketua RT/RW menyanggupi dan dengan sukarela untuk menjadi pengurus di TPST Mulyoagung.

Untuk itu dibentuklah kepengurusan TPST Mulyoagung Bersatu. Dalam hal pemilahan, pengangkutan serta pengomposan di TPST Mulyoagung Bersatu mengajak masyarakat Desa Mulyoagung yang berpenghasilan rendah atau yang tidak mempunyai pekerjaan untuk ikut berpartisipasi pada TPST, dan tenaga mereka akan digaji oleh pihak TPST. Sampai saat ini pekerja di TPST sudah

mencapai 64 orang, sebanyak 53 orang berasal dari Desa Mulyoagung sendiri.

Seperti yang dikatan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM mengatakan bahwa

“...kami pihak TPST juga melibatkan partisipasi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau tidak mempunyai penghasilan untuk bekerja pada TPST, sehingga TPST dapat memberdayakan dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga Desa Mulyoagung sendiri...” (wawancara, hari sabtu 12-01-13, pukul 10.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Konsep yang digunakan adalah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Seperti pada gambar.4.8 :



Gambar. 4.8 Pelaksanaan Konsep 3R

Sumber: Arsip TPST Mulyoagung Bersatu

Konsep *Reduce* yang diterapkan pada TPST memang tidak ada, karena

reduce lebih mengarah kepada masyarakat. Pihak TPST hanya memberikan

penyuluhan kepada masyarakat tentang konsep pengelolaan sampah berbasis 3R.

pihak TPST memberikan arahan tentang konsep *reduce* untuk mengurangi produksi sampah plastik seperti penggunaan tas kertas dan daun pisang sebagai pengganti tas plastik atau pembungkus yang berbahan baku plastik yang notabene merupakan sampah non-organik. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM mengatakan bahwa :

“...ya memang nggak ada kalau di TPST, soalnya kan itu langsung ke masyarakatnya, TPST hanya memberikan penyuluhan tentang penerapan 3R, tetapi untuk Desa Mulyoagung tidak bisa. Soalnya sampah nggak terpilah dari sumbernya...” (wawancara, 09-01-13 hari rabu, pukul 16.00, di kantor KSM Mulyoagung Bersatu)

sedangkan untuk konsep *Reuse* yaitu memanfaatkan kembali kantong plastik (kresek) bekas untuk pewadahan hasil produksi sampah basah (limbah nasi) untuk pakan ternak. Dapat dilihat pada gambar 4.9 :



Gambar. 4.9 Penggunaan Langsung (Reuse)

Sumber : Arsip TPST Mulyoagung Bersatu

Sedangkan konsep *Recycle* yang diterapkan pada TPST Mulyoagung yaitu Merupakan salah satu teknik pengolahan sampah, dimana dilakukan pemisahan atas benda-benda bernilai ekonomi seperti 6 macam jenis limbah bernilai

ekonomis dari sampah yang kemudian diolah sedemikian rupa sehingga dapat digunakan kembali baik dalam bentuk yang sama atau berbeda dari bentuk semula. Adapun jenis sampah hasil dari pemilahan tenaga pemilah dari TPST

Mulyoagung Bersatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kaca/Beling



Limbah kaca dibedakan karena limbah kaca masih memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan limbah kaca masih dapat dimanfaatkan meski tanpa harus menjalani proses daur ulang yakni untuk dijadikan kerajinan tangan, disisi lain bila melalui proses daur ulang limbah kaca dapat untuk dijadikan sebagai bahan baku dari perhiasan yakni melalui proses pelelehan pecahan kaca. Oleh karena itu limbah kaca yang telah terpisah dengan limbah lain dengan melalui proses packing limbah kaca siap untuk dijual ketempat penadah daur ulang limbah kaca.

2. Lapak Keras



Lapak keras pada jenis limbah ini yang dimaksud adalah limbah gelas dan botol air mineral, bak berwarna, bak warna hitam, mika plastik, PLS putihan, kaleng, aluminium dari kaleng minuman, aluminium dari peralatan dapur, mika keras dari CD, besi A dan B, limbah lampu TL akan bernilai ekonomis

bila dijual untuk didaur ulang. Jadi dengan melalui proses packing maka 12 macam limbah ini siap untuk dijual ke penadah limbah lapak keras.

3. Lapak Kertas



3 macam jenis lapak kertas pada kelompok ini terdiri dari limbah kertas kardus, limbah kertas duplek, dan limbah kertas HVS yang tentunya masih memiliki nilai ekonomis.

Limbah kertas akan bermanfaat setelah melalui proses daur ulang oleh industri kertas yang hasilnya adalah kertas-kertas baru maupun kardus-kardus baru. Selain itu limbah kertas jika tanpa harus melalui proses daur ulang oleh industri kertas juga dapat untuk dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti pembuatan kerajinan topeng. Oleh karena itu limbah kertas yang telah dikumpulkan dan disendirikan dengan yang lain dengan melalui proses packing limbah kertas siap untuk dijual ke penadah limbah kertas.

4. Lapak Plastik



2 jenis lapak plastik yang diantaranya adalah limbah plastik tas kresek (HD) dan limbah plastik putih (plastik kantong/ PP) dikumpulkan tersendiri dengan maksud

untuk dijual kembali ke penadah daur ulang limbah plastik agar memiliki nilai ekonomis, karena limbah plastik yang merupakan sampah anorganik atau tidak dapat untuk berbau dengan alam, pada sisi

ekonominya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Hal ini dikarenakan lapak plastik dapat didaur ulang untuk dijadikan beraneka macam benda yang berbahan plastik baik itu mainan anak, bak atau kaleng mandi, serta peralatan kebutuhan lain oleh perusahaan plastik. Jadi limbah plastik yang telah dikumpulkan dengan proses packing akan dijual ke panadaha limbah plastik untuk didaur ulang.

5. Limbah Nasi



Pada jenis limbah ini yakni limbah nasi (limbah bekas makanan). Limbah akan dikumpulkan dan dengan proses packing limbah nasi ini memiliki nilai ekonomis bila dijual ke peternak. Dan hal ini TPST Mulyoagung Bersatu bekerja sama dengan peternak babi, peternak ayam, serta angsa agar mau untuk membeli limbah nasi sebagai makanan dari hewan yang ditenak.

Setelah terpilah proses selanjutnya adalah pengomposan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi selaku Ketua KSM mengatakan bahwa :

“...setelah semua sampah terpilah antara sampah organik dan anorganik proses selanjutnya yaitu pengomposan, untuk sampah jenis lapak bernilai jual seperti kertas, plastik, kaca, karet, sepatu/ sandal, dll, nantinya akan dijual ke pengepul...” (wawancara, 12-01-13 hari sabtu, pukul 10.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Bahan baku pupuk kompos yaitu, merupakan sisa-sisa dari hasil pemisahan yang ada selain menghasilkan berbagai jenis limbah yang bernilai guna dan bernilai ekonomis juga menghasilkan sampah-sampah organik yang dimana pada

TPST Mulyoagung Bersatu dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Proses pembuatan pupuk organik di TPST Mulyoagung Bersatu dimulai dengan penumpukan sampah organik yang kemudian akan disiram dengan cairan Petrofast sebagai penambahan bakteri pengurai agar proses komposting lebih cepat. Setelah selama 25 hari tumpukan sampah organik tersebut akan dibuka dan digiling lalu disaring menjadi bubuk kecil dan halus yang kemudian akan dibungkus dan siap untuk dijual dengan harga Rp. 5.000 per 10 kilogram pupuk organik. Lihat gambar 4.10



Pengumpulan Sampah Organik



Proses Penggilingan



Proses Penyaringan



Pupuk Kompos Siap dijual

Gambar. 4.10 Proses Pengomposan

Pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung memang hanya berupa pupuk organik. Sedangkan sampah yang bisa dimanfaatkan untuk dibuat kerajinan belum

ada, sampah hanya dijual kepada pengepul. Untuk langkah kedepannya sampah yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan nantinya akan dikelola oleh Ibu-Ibu PKK Desa Mulyoagung. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi selaku ketua KSM mengatakan bahwa :

“...untuk rencana kedepan memang sudah ada rencana akan memanfaatkan sampah-sampah yang bisa dijadikan kerajinan yang nantinya akan dikelola oleh Ibu-Ibu PKK Desa Mulyoagung...” (wawancara, 12-01-13 hari sabtu, pukul 10.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

c. Paska Pengelolaan

Paska pengelolaan yang dimaksud disini adalah untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan produk (hasil olahan) dan memasarkan produk (hasil olahan) dari TPST. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil olahan (pupuk), tidak semua masyarakat memanfaatkan pupuk hasil olahan TPST Mulyoagung Bersatu. Hanya masyarakat yang membutuhkan saja dan tanpa dipungut biaya. Seperti yg disampaikan oleh Bapak Supadi selaku ketua TPST Mulyoagung Bersatu menyatakan bahwa:

“...masyarakat Mulyogung tidak dipungut biaya jika ingin memanfaatkan hasil olahan (pupuk) dari TPST, masyarakat tinggal datang saja ke kantor untuk meminta pupuk dan setiap KK maksimal mendapatkan gratis 10kg pupuk!...” (wawancara, 27-12-12 hari Kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Lebih lanjut lagi Bapak Supadi selaku ketua KSM mengatakan bahwa :

“...kebanyakan masyarakat yang mengambil pupuk di sini itu petani, tetapi ada juga ibu rumah tangga untuk pupuk tanaman dirumah, selain itu pupuk tpst ini juga di manfaatkan untuk penghijaun di Desa Mulyoagung...” (wawancara, 27-12-12 hari Kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Di Desa Mulyoagung dengan jumlah pemilik sawah yang ada sebanyak 150 orang, dan pemilik tanah tegalan/ladang sebanyak 30 orang, dengan adanya pupuk gratis yang diberikan oleh TPST sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya petani saat musim tanam sawah yang ada di Desa Mulyoagung.

seperti yang dikatakan oleh Bapak Sumardi Selaku Kepala Desa Mulyoagung mengatakan bahwa:

“...Di desa sini jumlah pemilik sawah ada 150 orang, dan pemilik tegalan/ladang ada 30 orang, dengan adanya pemberian pupuk gratis, diharapkan bisa memperbaiki struktur tanah yang ada di desa mulyoagung sehingga hasil bisa meningkatkan kualitas tanaman...” (wawancara, 18-12-12 hari selasa, pukul 10.00, di kantor Kepala Desa Mulyoagung)

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sulkan yang berprofesi sebagai petani warga Dusun Jetak Ngasri RT/RW 02/04 mengatakan bahwa :

“...iya mbak, saya biasanya ngambil pupuk organik di tpst saat musim rendeng, musim tanam padi seperti sekarang. Sekali ngambil saya dapat 2sak pupuk...” (wawancara, 29-12-12 hari sabtu, pukul 9.00, di Sawah Bapak Sulkan)

Berbeda dengan yang diungkapkn Ibu Yuyun warga RT/RW 5/9 yang mengatakan bahwa :

“...ya selama ini saya nggak pernah mengambil pupuk di TPST, ya buat apa mbak saya nggak bertani biar pupuknya dijual aja sama pihak TPST ...” (wawancara, 07-01-13 hari senin, pukul 16.00, di rumah kediamannya)

Sedangkan dalam memasarkan produk (hasil olahan) dari TPST Mulyoagung, pemasaran dilakukan oleh divisi pemasaran TPST dan tidak

melibatkan partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supadi selaku ketua KSM mengatakan bahwa :

“...dalam pemasaran pupuk dan lapak memang sudah ada tim nya sendiri, jadi ya tidak ada partisipasi masyarakat. Kami memasarkan ke kelompok-kelompok tani yang ada diwilayah dau dan sekitarnya. Sedangkan untuk lapak biasanya pengepul yang datang kesini karena KSM ini kan sudah banyak yang tau...” (wawancara, 27-12-12 hari kamis, pukul 11.00, di kantor TPST Mulyoagung Bersatu)

Dari hasil informasi dari beberapa informan rata-rata jawaban sama semua seperti yang dinyatakan oleh Bapak Sulkan warga Dusun Jetak Ngasri RT/RW 02/04 mengatakan bahwa :

“...selama ini memang belum pernah mbak saya ngasih tau ke orang lain kalau di Desa Mulyoagung jualan pupuk organik. Kan sudah ada petugas TPST nya sendiri...” (wawancara, 29-12-12 hari sabtu, pukul 09.00, di Sawah Bapak Sulkan)

Dengan adanya pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung, dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang dibuang ke TPA, hal ini karena sebelum dibuang ke TPA telah terjadi pemilahan antara sampah kering dan sampah basah yang telah dilakukan oleh petugas TPST. Dengan demikian dapat memperpanjang usia TPA dan mengurangi biaya pengelolaan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dengan melakukan pemilahan, maka masyarakat juga memperoleh manfaat dari hasil pemrosesan sampah organik yang dijadikan kompos.

C. Pembahasan

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST)

a. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan TPST

Menurut Juliantara dalam Purnamasari (2008), substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah:

“Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat. (Juliantara, dalam Purnamasari : 2008)”.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan meliputi berbagai hal sebagaimana dikemukakan oleh Sumoharjo (1984:54) yaitu “Keikutsertaan anggota masyarakat dalam usaha merealisasikan aspirasinya dengan jalan menyumbangkan pikirannya, inisiatif, dan kreativitasnya dalam bentuk pikirannya, usul, saran-saran dalam rapat resmi dan tidak resmi”. Pada dasarnya suatu perencanaan pembangunan supaya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, maka keikutsertaan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan merupakan faktor yang

penting. Berdasarkan hasil penyajian data fokus, pada tahap perencanaan pembangunan TPST telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam rapat atau musyawarah desa untuk membahas pembangunan TPST.

Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam hal perencanaan pembangunan TPST melalui perwakilannya ini sudah cukup tinggi, ini ditunjukkan pada tabel 4.6 yang menunjukkan jumlah wakil masyarakat yang hadir dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan TPST. Dalam tabel tersebut dapat dilihat bahwa perwakilan masyarakat yang diundang seluruhnya hadir dalam rapat musyawarah tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Desa Mulyoagung memang sangat antusias dan bersemangat untuk pembangunan TPST di Desa Mulyoagung, karena pembangunan TPST merupakan usulan / ide dari masyarakat sebagai solusi mengatasi masalah yang ada di Desa Mulyoagung. Jenis partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung menurut Keith Davis (Sastropoetro, 18988:16) yaitu berupa pikiran (*psychological participation*) merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengarahkan pikiran dalam suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk pembangunan TPST.

Bentuk partisipasi menurut Effendi dalam Zakaria (2011), partisipasi dibagi atas dua bentuk, yaitu partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal.

1. Partisipasi vertikal adalah suatu bentuk kondisi tertentu dalam masyarakat yang terlibat didalamnya atau megambil bagian dalam

suatu program pihak lain, dalam hubungan masyarakat berada sebagai posisi bawahan.

2. Partisipasi horizontal adalah dimana masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Menurut Effendi sendiri tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Jika merujuk dari pendapat Effendi bentuk partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung adalah partisipasi horizontal yaitu masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Dapat dilihat dari hasil wawancara bahwa semua masyarakat Desa Mulyoagung mempunyai kedudukan yang sama, sehingga masyarakat dapat mengusulkan ide atau pemikirannya pembangunan desa yang lebih baik. Terbukti dari ide awal pembangunan TPST pada Desa Mulyoagung merupakan keinginan dari masyarakat yang peduli pada lingkungan. Karena dulunya sebelum ada TPST sampah-sampah masyarakat Desa Mulyoagung tidak ada yang mengelola, sampah langsung dibuang dipinggiran DAS brantas. Dari antusias masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih maka masyarakat Desa

Mulyoagung mengusulkan kepada pemerintah agar dibuatkan tempat pengelolaan sampah. Karena keinginan masyarakat yang begitu kuat akhirnya direspon oleh pemerintah. Menurut Effendi sendiri tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991:154-155) sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dalam perencanaan pembangunan TPST juga dibahas tentang siapa yang akan mengelola TPST dan juga membahas dana pembangunan TPST. Pada dasarnya pembangunan TPST memang merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat agar tercipta lingkungan yang bersih dan dapat memberdayakan masyarakat Desa Mulyoagung itu sendiri. Oleh karena itu maka perencanaan yang berbasiskan

masyarakat selaku *stakeholder* menjadi penting. Hal tersebut didasari pertimbangan bahwa dengan perencanaan yang berbasiskan masyarakat, maka program pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi harmonis, berdaya guna dan berhasil guna sekaligus wahana untuk mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan dari bawah *bottom up planning*.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

b. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan TPST

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPST Desa Mulyoagung dibedakan menjadi partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/material dan dalam bentuk tenaga/jasa. Dalam bentuk uang partisipasi masyarakat tidak besar, karena pembangunan TPST sebagian dana banyak diperoleh dari pemerintah sehingga semua pembangunan fisik TPST ditangani oleh pemerintah.

Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga/jasa sudah baik.

Jenis partisipasi yang ada di Desa Mulyoagung jika merujuk pada pendapat Keith

Davis yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), yaitu dalam bentuk tenaga

(*physical participation*) dimana partisipasi baik individu maupun kelompok

dengan tenaga yang dimilikinya melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan

maksud tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penyajian data fokus bahwa dalam

pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi baik berupa

tenaga/jasa saat pembangunan berlangsung. Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan

dengan pembangunan TPST, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja

yang diberikan oleh masyarakat, warga ikut berpartisipasi dalam rangka

pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka.

Partisipasi tenaga kerja yang ada di desa di dasari dengan semangat gotong

royong. Masyarakat Desa mulyoagung bergotong royong dalam pembuatan jalan

menuju TPST.

c. Partisipasi Masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan (TPST)

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu diharapkan masyarakat

ikut menjaga dan memelihara hasil pembangunan di desanya dengan sebaik-

baiknya, bukan sebaliknya merusak. Semua masyarakat hendaknya dapat

memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik, namun tidak hanya sebatas

memanfaatkannya, tetapi juga ikut menjaga agar dapat dimanfaatkan generasi

yang akan datang.

Sesuai dengan hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam memelihara TPST sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk membayar iuran guna membiayai operasional TPST agar tetap berjalan dengan baik. Karena TPST Desa Mulyoagung merupakan hasil swadaya dari masyarakat maka peran masyarakat dalam membayar iuran sangatlah penting agar TPST tetap bisa berjalan dan berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Slamet (1994:89), partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) yaitu pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Dalam membayar iuran sudah cukup tinggi, dapat diketahui pada tabel 4.8 bahwa 83% dari total jumlah 65 rumah telah membayar iuran penuh kepada TPST, 17% tidak membayar kepada TPST dan 20% membayar dibawah ketentuan pembayaran iuran yang telah ditetapkan. Masih adanya iuran yang masuk TPST dibawah penetapan tarif iuran TPST, dikarenakan adanya faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi yaitu faktor pekerjaan dan penghasilan. Seperti yang disampaikan oleh Ndraha (1990:22) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi salah satunya adalah pekerjaan dan penghasilan dimana pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

Dalam memanfaatkan TPST juga sangat baik, selain untuk mengelola sampah agar lingkungan menjadi bersih TPST juga dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang ada yaitu mengajak atau mempekerjakan masyarakat Desa Mulyoagung yang tergolong ekonomi rendah

untuk bekerja di TPST, Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung. Dapat dilihat pada tabel 4.9 bahwa TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 2013 sudah bisa mempekerjakan sebanyak 64 orang hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Bahkan pekerja TPST tidak cuma berasal dari Desa Mulyoagung sendiri, 11 diantaranya berasal dari desa lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan TPST sudah sangat baik. Masyarakat dengan sukarela dan penuh kesadaran untuk membayar iuran sampah tiap bulannya agar kegiatan TPST bisa tetap terus berjalan dan tidak berhenti ditengah jalan. Karena TPST Mulyoagung Bersatu bersifat mandiri dimana dana operasional TPST bukan bersal dari pemerintah melainkan dari iuran masyarakat serta hasil penjualan produk TPST Mulyoagung Bersatu.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

a. Pra Pengelolaan

Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka. Dalam pra pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya sendiri. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di sumbernya, individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari air hujan. Untuk menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh sumber sampah.

Pewadahan tersebut ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memudahkan dan cepat bagi para petugas untuk mengambilnya secara teratur dan higienis.

Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Faizah (2008), dalam pengelolaan menuju *zero waste*, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah

anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali.

Di Desa Mulyoagung partisipasi masyarakat dalam pewadahan sudah baik.

Dari hasil penelitian di Desa Mulyoagung setiap depan rumah masyarakat terdapat tempat sampah. Masyarakat wewadahi sampah-sampahnya pada kantong kresek

dan dibuang pada tempat sampah depan rumahnya. Akan tetapi pewadahan

sampah tidak disertai dengan pemilahan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi

kebiasaan masyarakat, selain itu keberadaan tempat sampah yang disediakan di

setiap rumah di Desa Mulyoagung hanya disediakan satu tempat sampah, tempat

sampah yang disediakan tidak dibedakan antara sampah basah dan sampah kering.

Walaupun tanpa pemilahan, dengan ikut berpartisipasi dalam mewadahi

sampahnya sendiri itu sudah baik. Sehingga sampah tidak berserakan, masyarakat

juga mau membuang sampahnya di tempat sampah.

b. Proses Pengelolaan

Pengelolaan sampah memang sudah bukan lagi tanggung jawab pemerintah

saja, masyarakat sebagai penghasil sampah setidaknya juga ikut mengurus

sampahnya. Dalam pengelolaan sampah rumah tangga harus ada kerjasama antara

pemerintah dan masyarakat, agar tujuan pengelolaan dapat berhasil sesuai yang

diharapkan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Keduanya harus

mampu menciptakan sinergi. Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak

akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal.

Dalam proses pengelolaan sampah pada TPST Mulyoagung Bersatu masyarakat disini yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi pengurus TPST. Kepengurusan TPST terdiri dari ketua RT/RW dan Tokoh Setempat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip (Sastropoetro, 1988:16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela mengurus TPST dengan maksud agar tercipta lingkungan yang bersih.

KSM juga melibatkan partisipasi masyarakat lain yaitu untuk bekerja menjadi pengangkut, pemilah dan pengomposan. Masyarakat yang menjadi pekerja pada TPST ini merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

c. Paska Pengelolaan

Sama halnya dengan proses pengelolaan sampah, dalam hal pemasaran hasil dari TPST tidak melibatkan banyak masyarakat. Karena sudah ada tim divisi pemasaran dari pihak TPST yang tergabung dalam Kelompok Swadaya

Masyarakat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip (Sastropetro, 1988:16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu.

Dalam memanfaatkan hasil olahan dari TPST khususnya pupuk organik sudah baik, apalagi pupuk organik diberikan secara gratis untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Dengan adanya pemberian pupuk organik gratis diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian maupun tanaman hias milik warga Desa Mulyoagung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung sangat besar dalam pembangunan TPST, baik dalam perencanaan pembangunan TPST, pelaksanaan pembangunan TPST dan partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan TPST. Hal ini terlihat dari keikutsertaan seluruh elemen masyarakat desa dalam perumusan kegiatan pembangunan TPST, antara lain Ketua RT/RW serta tokoh-tokoh masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPST di Desa Mulyoagung dilakukan melalui 2 (dua) jenis, yaitu Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang dan partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga. Kontribusi keduanya memang tidak terlalu besar karena pembangunan TPST membutuhkan dana yang besar sehingga dana diperoleh dari pemerintah.
3. Besarnya partisipasi masyarakat di Desa Mulyoagung dalam pembangunan TPST dilatarbelakangi oleh manfaat yang dihasilkan dengan dibangunnya TPST di Desa Mulyoagung. Karena dengan dibangunnya TPST, sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak lagi dibuang di pinggir DAS Brantas.
4. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung adalah partisipasi horizontal yaitu masyarakat tidak mustahil untuk mempunyai prakarsa dimana setiap

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu dengan yang lainnya, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

5. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R, dalam skala individu memang kurang. Karena masyarakat mewedahi sampahnya tanpa ada pemilahan antara sampah kering dan sampah basah. Dalam skala kelompok, partisipasi masyarakat sangat baik. Masyarakat yang peduli lingkungan tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat yang kepengurusannya terdiri dari RT/RW dan Tokoh Masyarakat Desa Mulyoagung. Dan masyarakat yang menjadi pengurus TPST sifatnya sukarela tanpa mendapatkan imbalan atau gaji. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R skala kelompok sangat baik.
6. Pemilahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyoagung didorong oleh faktor ekonomi dimana masyarakat melakukan pemilahan karena adanya nilai ekonomis untuk dijual kembali. Warga yang berpenghasilan rendah cenderung melakukan pemilahan sampah yang bernilai jual dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan cukup.
7. Tujuan dibangunnya TPST sudah sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu menjaga kelestarian lingkungan serta memberdayakan masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam pembangunan dan perkembangan desa sudah baik. Oleh karena pemerintah harus selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa sehingga pembangunan akan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pemerintah menyediakan dua tempat sampah yang berbeda antara sampah basah dan sampah kering, karena di Desa Mulyoagung tempat sampah antara sampah basah dan sampah kering menjadi satu tempat. Dan untuk pengangkutan sampah, pemerintah juga membuat gerobak / pengangkut sampah yang di desain dengan memisahkan antara sampah basah dan kering. Sehingga sampah yang sudah dipilah masyarakat tidak tercampur saat pengangkutan sampah.
3. Pemerintah harus senantiasa mendukung dan memberikan pelatihan agar TPST Mulyoagung Bersatu tetap bisa berjalan seterusnya, dan juga memberikan pelatihan dalam mengelola sampah yang masih bisa dipakai untuk dibuat kerajinan sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi.

Lampiran 1 : Surat Riset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi : Sarjana - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 1254 / UN.10.3/ PG /2012
Lampiran : -

Hal : Riset

Kepada : Yth. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Malang
Di Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak / Ibu / Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra survey penelitian bagi mahasiswa :

Nama : Devi Hernawati
Alamat : Bumi Asri Sengkaling Tahap III G/19
NIM : 0910311004
Jurusan : Administrasi Publik
Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R
(Reduce, Recycle dan Reuse)
(Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Mulyoagung)
Waktu Penelitian : 2 Bulan (Desember - Januari)

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 3 Desember 2012
a.n Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. M.R. Khaiful Muluk, M.Si
NIP. 19710510 199803 1 004

Lampiran 2 : Surat persetujuan Survei



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 1254 /421.205/2012

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
Nomor : 11543/UN10.3/PG/2012 Tanggal 3 Desember 2012 Perihal Ijin Riset

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan Riset oleh :

Nama / Instansi : Devi Hernawati / Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Alamat : Jl. MT. Haryono 163 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (Reduce, Recycle, dan Reuse)

Daerah/tempat kegiatan : UPTD Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang

Lamanya : Desember 2012 s.d Januari 2013

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 05 Desember 2012

A.n **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

KABUPATEN MALANG

KABID IDEOLOGI, HAM & WASBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUDIANTO HERMAWAN, SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Malang
3. Sdr. Kepala UPTD TPS Terpadu Desa Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
4. Sdr. Camat Dau Kab. Malang
5. Sdr. Kepala Desa Desa Mulyoagung Kab. Malang
6. Sdr. Mhs. Ybs
7. Arsip

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan

A. Pertanyaan kepada Aparat Desa dan KSM

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPST? Baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan.
2. Dana pembangunan TPST berasal darimana? Apakah masyarakat juga ikut menyumbang dana untuk pembangunan?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah?
4. Seperti apa bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah? Apakah masyarakat sudah memilah sampahnya?
5. Bagaimana proses penarikan iuran sampah?
6. Berapa besar iuran yang ditetapkan setiap rumahnya?
7. Apakah masyarakat tidak keberatan dengan adanya penarikan iuran sampah?

B. Pertanyaan kepada Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan mengenai adanya TPST?
2. Apakah sudah melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik?
3. Apakah ikut menggunakan hasil olahan dari TPST? Seperti pupuk. Seberapa sering?
4. Pernahkah ikut memasarkan hasil olahan TPST dengan promosi dari mulut ke mulut kepada masyarakat desa lain?
5. Berapa besar iuran untuk sampah?
6. Tidak adakah keberatan dengan adanya penarikan iuran?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- **Data Pribadi**

Nama : Devi Hernawati

Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 23 Oktober 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Bumi Asri Sengkaling Tahap III blok GG-19

Telepon (HP) : 08563677017

- **Latar Belakang Pendidikan**

Formal

1998 - 2003 : SDN Mrican III Kediri

2003 - 2006 : SLTP Negeri 1 Kediri

2006 - 2009 : SMA Negeri 7 Kediri

- **Pengalaman Kerja**

Magang / Praktek Kerja Lapangan

Magang di PT (persero) Pegadaian Cabang Blimbing Malang

Periode : 1 Mei 2012 – 1 Juni 2012

Tujuan : Syarat Skripsi

Posisi : Front Office